PERAN PEMERINTAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH

(Studi pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:
DENY OCTAVIA
NIM. 0510313028

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2009

MOTTO

Dalam menjalani hidup ini kita harus berjuang dan

Mengawali semua dengan berdoa kepada Allah SWT

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Juni 2009

Jam : 11.00

Skripsi Atas Nama : **DENY OCTAVIA**

Judul **: PERAN PEMERINTAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH (Studi Pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo)**

Yang dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

KETUA	ANGGOTA
Drs. Trilaksono Nugroho, MS	Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 131 573 952	NIP. 131 475 901
Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS	Drs. Irwan Noor, MA
NIP. 130 936 634	NIP. 131 570 387

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 2 dan pasal 70).

Malang, Juni 2009

Deny Octavia

0510313028

RINGKASAN

Deny Octavia, 2009, **Peran Pemerintah dalam Menunjang Peningkatan Investasi Daerah (Studi Pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo),** Drs.Tri Laksono Nugroho, M.S, Drs. Abdullah Said, M.Si, 117 Hal + xiii.

Pembentukan modal merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, namun tidak mudah untuk dapat membentuk sejumlah modal yang cukup bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pinjaman modal atau dukungan dari investor. Untuk dapat menarik minat investor agar menanamkan modal di daerah diperlukan suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta sangat diperlukan adanya peran aktif Pemerintah Daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah untuk berupaya meningkatkan investasi di daerah.

Dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran-peran yang dapat dilaksanakan pemerintah, khususnya Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo dalam menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan masalah investasi, sehingga dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang ada, peran pemerintah dalam meningkatkan investasi daerah, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di daerah tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan investasi di Kota Probolinggo berdasarkan data-data yang diperoleh. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Potensi Investasi yang terdapat di Kota Probolinggo, Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Daerah, serta Faktor yang menjadi Penghambat dan Pendukung Investasi yang terjadi di Kota Probolinggo. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi. Tahap analisa yang dilakukan dimulai dari proses pemilihan data-data yang diperlukan, kemudian data disusun dan disajikan, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Kota Probolinggo merupakan suatu daerah yang mempunyai potensi yang tinggi, yaitu meliputi potensi industri, perdagangan, perikanan, pelabuhan, dan perkebunan. Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan investasi di daerah antara lain sebagai koordinator, stimulator, entrepreneur, dan fasilitator. Faktor penghambat yang terdapat di Kota Probolinggo sendiri adalah belum adanya keterkaitan antar instansi dan faktor keamanan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah letak Kota Probolinggo yang strategis dan potensi investasi yang dimiliki oleh Kota Probolinggo.

Berbagai upaya sesuai dengan perannya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo secara optimal yang terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitasnya, juga melalui penetapan kebijakan pemberian insentif yang mendukung investasi di Kota Probolinggo. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo telah menunjukkan kinerjanya yang sangat baik dalam peran meningkatkan investasi di Kota Probolinggo. Saran yang direkomendasikan adalah agar Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk lebih aktif dan kreatif lagi dalam melakukan promosi akan potensi daerah yang dimiliki.

SUMMARY

Deny Octavia, 2009**. The government role in supporting the improvement of territory investment (Study in Economy and capital investment division of local secretary of Probolinggo city),** Drs. Tri Laksono, M.S, Drs. Abdullah said, M.Si, 117 Pages + xiii.

Capital establishment is an essential factor in realizing the success of local economy development. It is difficult to establish some capital that afford that local economy development. Hence capital loan or investor support is needed. To make the investor interested in local capital investment, favorable atmosphere of trade and investment are needed. The active role of local government is also essential to raise the local investment.

The research was done to study the government roles, especially in Economy and capital investment division of local secretary of Probolinggo city, in responding the trends happened related to the investment problem so treatments supporting the raise of investment in local territory can be done by taking note of the local potency available, the government roles, and the supporting and inhibiting factors of investment in that territory.

The research used descriptive qualitative method by describing and explaining the investment situation in Probolinggo City based on the data found. The investment potency, the government roles in increasing the local investment, and the supporting and inhibiting factors of investment in Probolinggo City became the research focus. Data needed was gathered by documenting, interviewing and observing. Data analysis was done by selecting the data needed, arranging and presenting, and then summarizing.

Probolinggo City is a high-potency territory including industry, trade, fishery, anchorage, and plantation. The government roles in increasing the local investment are as coordinator, stimulator, entrepreneur, and facilitator. The inhibiting factors are unconnected government institution and safety while the supporting factors are the strategic location and investment potency of Probolinggo City.

Many efforts was done by the government such as improving the quality and quantity, incentive-giving policy that supports the investment in Probolinggo City. Economy and capital investment division of Probolinggo city have shown their work well in improving the investment in Probolinggo City. The suggestion recommended to the Local Government of Probolinggo City is that they have to be more creative and active in promoting their local potency.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Pemerintah dalam Menunjang Peningkatan Investasi Daerah (Studi pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Papa dan Mama tercinta serta kakak dan adikku yang telah memberikan doa, semangat dan mendidik penulis dengan kesabaran.
2. Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab MA.PhD selaku Ketua Jurusan Ilmu administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Drs. Tri Laksono Nugroho, M.S selaku Dosen Pembimbing Pertama
5. Drs. Abdullah Said, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua
6. Dra. Herrien Purnamawati, M.Si selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, dan seluruh pegawai / petugas yang telah membantu penelitian
7. Ibu Nunuk selaku pegawai badan perijinan yang telah membantu dalam penulis dalam mendapatkan data
8. Aditya Permana Putra yang telah memberi dukungan penulis dengan sabar

9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2009

Penulis

Deny Octavia

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO
TANDA PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN iv
SUMMARY v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kontribusi Penelitian 10
E. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Paradigma Administrasi Pembangunan
   1. Model Administrasi Negara di Negara Berkembang 13
   2. Konsep Administrasi Pembangunan 14
   3. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan 16
B. Pemerintah Daerah
   1. Pengertian Pemerintah Daerah 17
   2. Kewenangan Pemerintah Daerah 18
   3. Desentralisasi 20
C. Otonomi Daerah
   1. Pengertian Otonomi Daerah 23
   2. Tujuan Otonomi Daerah 27
   3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah 27
   4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah 29
   5. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 30
D. Investasi dan Pembentukan Modal Pembangunan
   1. Pengertian Investasi 32
   2. Bentuk-bentuk Investasi 35
   3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi 36
   4. Pentingnya Pembentukan Modal dalam Pembangunan 38
E. Potensi dan Pembangunan Daerah
   1. Potensi Daerah 41
   2. Pembangunan Daerah 44
   3. Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah 49
   4. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah 50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 52
B. Fokus Penelitian 53
C. Lokasi dan Situs Penelitian 54
D. Sumber Data 54
E. Teknik Pengumpulan data 55
F. Instrumen Penelitian 57
G. Analisis Data 57
H. Keabsahan Data 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian data 60
1. Gambaran Umum 60
a. Deskripsi Kota Probolinggo 60
1) Keadaan Kota Probolinggo 60
2) Luas Wilayah dan Batas Wilayah 60
3) Kondisi Demografi (Penduduk) 65
4) Keadaan Sosial Budaya 67
5) Keagamaan (Prasarana Ibadah) 68
6) Perekonomian 69
b. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal 70
1) Visi dan Misi 70
2) Tujuan dan sasaran 71
3) Arah Kebijakan dan Program 72
4) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 72
2. Data Fokus Penelitian 73
a. Potensi Investasi yang terdapat di Kota Probolinggo 73
1) Sektor Industri dan Perdagangan 74
2) Sektor Perikanan dan Pelabuhan 82
3) Sektor Perkebunan 90
b. Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Investasi 94
1) Sebagai Koordinator 94
2) Sebagai Stimulator 95
3) Sebagai Entrepreneur 98
4) Sebagai Fasilitator 100
c. Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Kota Probolinggo 101
1) Faktor Penghambat 101
2) Faktor Pendukung 102
B. Analisa dan Interpretasi Data 105
1. Potensi Investasi yang tredapat di Kota Probolinggo 105
2. Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Investasi 106
a. Sebagai Koordinator 107
b. Sebagai Stimulator 108
c. Sebagai Entrepreneur 109
d. Sebagai Fasilitator 111
3. Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Kota Probolinggo 112
a. Faktor Penghambat 112

b. Faktor Pendukung 115
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 117
B. Saran 118
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah 48
2. Industri Kecil Bordir 76
3. Pangkalan Pendaratan Ikan 86
4. Pelabuhan Tanjung Tembaga 87
5. Daerah Hiterland 90
6. Mangga Kota Probolinggo 92
7. Anggur Kota Probolinggo 92

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Luas Wilayah Kecamatan berdasarkan Masing-masing Kelurahan..... 61
2. Batas Wilayah Administrasi Kota Probolinggo 62
3. Luas Penggunaan Lahan Kota Probolinggo tahun 2006 65
4. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan 66
5. Jumlah Penduduk Akhir Tahun menurut Data Mata Pencaharian 67
6. Jumlah Organisasi Kesenian menurut Jenisnya 68
7. Jumlah Sarana Ibadah di Kota Probolinggo..... 69
8. Industri Besar di Kota Probolinggo 74
9. Industri Kecil di Kota Probolinggo 75
10. Kondisi Industri Kecil dan Menengah di Kota Probolinggo..... 77
11. Data Proyek Perusahaan PMA di Kota Probolinggo 78
12. Data Proyek Perusahaan PMDN di Kota Probolinggo 80
13. Perkembangan Perusahaan Perdagangan di Kota Probolinggo 81
14. Perkembangan Investasi Bidang Perdagangan Kota Probolinggo 82
15. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2006 84
16. Perkembangan Tanaman Perkebunan tahun 2006 91

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta Kota Probolinggo 123

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Kekayaaan alam tersebut membentang dari sepanjang nusantara baik itu yang terkandung di dalam lautan yang mengelilingi hampir sebagian besar wilayah Indonesia, dan juga di wilayah daratannya. Dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah tersebut dikelola dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya dengan dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Perjalanan otonomi daerah memasuki babak baru setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999. Undang-undang 32 tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan makmur tersebut salah satunya adalah melaksanakan pembangunan. Menurut Siagian (1990:2-3), pembangunan merupakan “suatu usaha atau rangkaian usaha petumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembenahan bangsa”. Pembangunan pada negara berkembang seperti Indonesia ini mempunyai tantangan yang besar dengan adanya arus globalisasi pada saat ini.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan Bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan serangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang bermaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", maka pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan masyarakat mulai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan tersebut dapat dicapai apabila didukung oleh peranserta masyarakat secara menyeluruh, mantapnya pembangunan dan kepemimpinan nasional, yang didukung oleh stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk mendukung pembangunan nasional agar merata di seluruh wilayah Indonesia maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, karena itu pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian alternative yang terbaik untuk mengatasinya adalah melaksanakan pembangunan nasional yang bersifat multidimensional dan terintegratif yang mengandung pengertian bawasannya pembangunan nasional yang direncanakan dan dilaksanakan tersebut menyangkut segala aspek kehidupan bangsa yang terjalin dalam suatu keterikatan hubungan timbal balik yang sangat erat antara aspek yang satu dengan yang lainnya dengan tidak meninggalkan satu aspek pun seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Dengan meningkatnya tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan di bidang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamijoyo (1994:58), "Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan akan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lainnya". Dukungan yang diberikan pada aspek-aspek lainnya harus benar-benar diperhatikan agar pembangunan yang terpusat dan tidak merata dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi pembangunan aspek-aspek yang lainnya yang selama ini terjadi tidak terulang, misalnya dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga harus mampu

mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang sampai saat ini dijumpai dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu dalam pembangunan ekonomi juga diperlukan pembentukan modal.

Pembentukan modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, baik modal material maupun modal manusia. Oleh karena itu, setiap negara memerlukan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Pembentukan modal menjadi suatu masalah yang cukup berarti bagi negara sedang berkembang, karena salah satu ciri negara sedang berkembang adalah tingkat pendapatan rendah. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan juga rendah. Dengan tabungan yang rendah maka tingkat investasi pun rendah. Akibatnya produktivitas suatu negara juga rendah karena kekurangan modal. Pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan pendapatan negara saja, namun sangat diperlukan dukungan modal swasta dalam negeri maupun swasta asing.

Administasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, dan Administrasi Pembangunan adalah proses penggiringan suatu organisasai untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan, ini merupakan pelaksanaan dan wadah administrasi dalam mengintegrasikan kemudahan mencapai objek pembangunan. Di Indonesia pengkajian Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan ini mutlak diperlukan karena kita bangsa Indonesia memerlukan pengkajian tentang bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasi, diperlengkapi tenaga kerjanya, dibiayai, digerakkan, dimotivasi, dan dipimpin guna mencapai tujuan pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan politik. Pemerintah sangat memegang peranan penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya guna peningkatan pembangunan ekonomi.

Negara berkembang berusaha meningkatkan proses produksi barang dan jasa dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pada konsep ”Pertumbuhan Tidak Berimbang” adalah usaha menyeleksi sektor yang akan ditumbuhkembangkan dalam pembangunan ekonomi. Karena itu investasi harus diseleksi keberadaannya disamping penyediaan infra struktur ekonomi yang sudah harus siap pakai. Selanjutnya agar pihak swasta tertarik untuk menginvestasikan

modalnya pada infra struktur ekonomi tersebut, maka pemerintah harus mampu melindungi dan menjamin keberadaan tarif dengan pajak yang harus rendah, subsidi harus ada, serta kemudahan-kemudahan lainnya.

Investasi juga harus dipilih secara selektif serta teknologi yang digunakan harus disesuaikan dan barang modal harus dijamin perawatannya. Dengan begitu dalam memilih investasi harus padat tenaga kerja yang potensial, inflasi harus ditekan serta tabungan didorong supaya investasi itu sendiri lebih menguntungkan.

Setelah pada masa Orde Lama, Indonesia sempat menentang masuknya modal asing, khususnya modal dari negara-negara barat, pada masa Orde Baru Indonesia telah membuka diri kembali terhadap modal asing, disamping juga merangsang kalangan swasta dalam negeri untuk menanamkan modal sebagai pertimbangan perbaikan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada masa ini Pemerintah menerbitkan dua buah undang-undang berkaitan dengan investasi, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disempurnakan dalam UU No. 12 Tahun 1970. Dalam rangka menarik minat investor dan untuk menciptakan iklim yang kondusif, maka pada perkembangan selanjutnya dilakukan *deregulasi investasi*, yaitu penyederhanaan-penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut berkisar pada masalah pengaturan penguasaan saham; prosedur perijinan; penggunaan tenaga kerja; kaitannya dengan upaya peningkatan ekspor; keringanan pajak; serta ketentuan mengenai sektor atau bidang usaha yang boleh (masih terbuka) dan tidak boleh (sudah tertutup) bagi investasi baru.

Walaupun maraknya investasi dalam pembangunan ekonomi nasional sangat diharapkan, namun pemerintah juga harus mengantisipasi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh masuknya modal asing dalam perekonomian nasional, baik bagi swasta maupun BUMN dan BUMD, agar tidak tergusur oleh dominasi asing dalam pemilikan sosial unit-unit ekonomi, baik di sektor swasta maupun di sektor negara; mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam proyek-

proyek PMDN dan PMA dan meminimalisir penggunaan tenaga kerja asing; perlindungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat; serta pemerataan pendapatan. Hal ini juga sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan penanaman modal asing.

Dengan melihat pentingnya peranan penanaman modal dalam pembangunan ekonomi, maka kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia juga diarahkan pada peningkatan peranan pemerintah dalam meningkatkan investasi. Seiring dengan arus globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisasi arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya, bangsa Indonesia juga diperhadapkan pada penyelenggaraan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat sendiri kecuali yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang (*negative list*), sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, daerah juga dituntut untuk dapat mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Dalam menghadapi tuntutan tersebut dalam era globalisasi, terutama untuk menghadapi era perdagangan bebas, setiap daerah berupaya untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, untuk meningkatkan investasi, baik berupa PMDN maupun PMA, serta mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global, termasuk bagi BUMN/BUMD yang berada di daerah, sebagaimana disebutkan Mardiasmo (2002:68, 154) bahwa:

> Dalam menghadapi otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian peranan ekonomi swasta, BUMN dan BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan sebagai *center of economic activities*), serta menimbulkan multiplier effect yang besar.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, maka daerah diberi kewenangan untuk menangani seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang telah diatur dalam undang-

undang. Namun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa juga ada beberapa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Jadi jelas bahwa penanaman modal juga merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib ditangani dan diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Adanya otonomi daerah sebenarnya juga menimbulkan dilema bagi daerah, khususnya berkaitan dengan investasi. Di satu sisi daerah dituntut untuk pandai-pandainya menggali pendapatan daerah, sedangkan di sisi lain daerah juga dituntut untuk mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk meningkatkan investasi, salah satunya melalui pemberian insentif bagi investor. Jadi dengan adanya otonomi daerah juga menimbulkan ketakutan bagi calon investor karena akan semakin banyak pos pungutan dan retribusi yang diatur dalam perda setiap daerah kabupaten/kota, sehingga hal ini dapat menghambat perkembangan tingkat investasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengambil kebijakan yang paling tepat untuk dapat meningkatkan investasi, tetapi juga tetap mendapatkan masukan bagi PAD.

Iklim investasi di Indonesia juga diwarnai dengan kualitas pelayanan aparat yang masih rendah. Masih banyak terjadi pungutan liar, baik biaya tidak resmi yang harus dibayarkan kepada aparat birokrasi, maupun pungutan liar di seputar lingkungan usaha yang dilakukan sekelompok orang atas nama organisasi masyarakat, pemuda kampung maupun preman. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha juga mendapat perlakuan diskriminatif dalam hal perijinan usaha. Pelayanan yang lebih baik diberikan kepada kalangan usaha yang mampu membayar biaya perijinan lebih besar dibanding kelompok yang kurang mampu. Hal ini juga disebabkan karena tidak ada penetapan biaya yang jelas dan pasti. Hal ini yang juga dapat menghambat iklim investasi di daerah adalah masalah ketidakjelasan kebijakan sesudah otonomi daerah, dimana banyak peraturan yang tidak sinkron dan saling berbenturan satu dengan lainnya.

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2003 telah dicanangkan Tahun Investasi 2003 di Istana Negara oleh Presiden RI. Dengan pencanangan tahun investasi ini diharapkan tumbuhnya kesadaran, kepedulian dan kemitraan seluruh masyarakat dan komponen bangsa Indonesia akan arti pentingnya investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pemulihan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan peran aktif seluruh masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan membenahi berbagai hal yang menghambat kegiatan investasi di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo, sebagaimana disebutkan dalam website resminya pemerintah daerah Probolinggo (www.probolinggo.go.id), menegaskan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo saat ini sedang menjalin kerjasama dengan PT Pelindo III untuk mengembangkan pelabuhan yang dibangun tahun 1920 itu. Pelabuhan ini selain melayani pelayaran samudera, nusantara (antarpulau), pelayaran lokal dan rakyat, juga menjadi tempat untuk keluar masuknya perdagangan domestik antarkawasan di pulau Jawa bagian Timur.Dengan proyek pengembangan pelabuhan ini, diharapkan pelabuhan Tanjung Tembaga dapat menjadi pelabuhan ekspor impor dan dermaga sandar bagi kapal-kapal berukuran 5.000 DWT. Pemerintah kota yakin proyek ini akan mampu mendorong perkembangan industri dan menunjung pertumbuhan ekonomi daerah, yang dengan sendirinya akan meningkatkan PAD Kota Probolinggo. Jenis komoditas terbanyak yang di ekspor dari pelabuhan ini adalah plywood, yang dihasilkan dari industri kayu, bambu, rotan dan sejenisnya.

Sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang penanaman modal kepada masyarakat/pengusaha/investor telah dibentuknya Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang diterapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor: 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo sehingga pelayanan perijinan di Kota Probolinggo penyelenggaraannya dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu dengan Motto “Sederhana, Mudah, Cepat, Transparan dan Pasti”.

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang menjadi incaran para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya, karena Kota Probolinggo dipandang sebagai daerah yang mempunyai potensi investasi yang cukup tinggi, baik dari sektor industri, pelabuhan, perikanan, perdagangan, maupun perkebunan, dimana telah dibuktikan dengan banyaknya proyek investasi yang telah dilaksanakan di Kota Probolinggo, baik PMDN maupun PMA. Jumlah industri besar di Kota Probolinggo pada tahun 2008 sebanyak 22 perusahaan dengan 6 diantaranya berstatus PMA dan prioritas pemasarannya sebagian besar adalah ekspor. Seperti diberitakan pada koran Radar Bromo hari kamis tanggal 19 maret 2009 bahwa Kota Probolinggo kembali dilirik investor. Setelah PT Manggalindo yang bergerak di bidang perikanan, kini datang lagi perusahaan dari Jakarta yang punya rencana berinvestasi di kota ini, yaitu PT Papitra Buana Sejahtera. PT Papitra bergerak dalam bidang *investment, general trade*, *hospital*, *education* dan *training*. PT Papitra datang ke Kota Probolinggo bermula dari rekomendasi pemkot lain dan berdasar kabar yang mereka dengar sendiri. Bahwa Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo sudah mulai dikembangkan. Kepala Bappeda Budi Kristanto menjelaskan, dalam pertemuan dengan PT Papitra itu disampaikan bahwa pengembangan pelabuhan berdampak positif bagi investasi daerah, karena kalau pelabuhan ini sudah jadi maka mereka (investor) bisa menggunakan celah untuk berinvestasi. Untuk menarik investor, Kota Probolinggo bakal meningkatkan status terminal Bayuangga dari tipe A menjadi tipe A plus atau terminal modern. Pasalnya, di sini terminalnya masih tergolong tradisional. Menjadi terminal modern diperlukan perubahan demi kenyamanan penumpang, perubahan manajemen dan bangunan. Pemkot berupaya dengan luas terminal 2,5 hektar itu bisa mendapatkan dana sebesar Rp 40 M dari pemerintah pusat. Jika ini terealisasi, pasti investor akan semakin tertarik. Pertemuan antara Wali Kota dan investor itu memang belum memutuskan adanya bentuk investasi yang bakal ditanam. Tahap berikutnya, bakal ada pertemuan di Jakarta dan PT Papitra akan mengirim tim untuk mengukur studi kelayakan investasi di Kota Probolinggo. Ketertarikan investor mengenal dan menjajaki Kota Probolinggo disebabkan banyak faktor. Seperti bidang ekonomi di Probolinggo punya nilai yang sangat tinggi. Dari segi keamanan kondusif. Jalur

lokasi strategis, sebagai kota transit. Dan ini bakal bertambah nilai plusnya dengan adanya pengembangan pelabuhan.

Dalam keberadaan Kota Probolinggo yang strategis, didukung oleh potensi daerah yang tinggi namun banyak yang belum tergali dan dimanfaatkan tersebut, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam menarik minat para investor untuk menanamkan modal, serta berupaya mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini masih ada dalam menangani masalah investasi, seperti dalam memberikan jaminan kepastian pelaksanaan investasi bagi investasi yang telah disetujui dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait.

Dengan iklim usaha dan investasi yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan investasi di Kota Probolinggo. Pada akhirnya nanti, adanya kegiatan investasi akan menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Peran Pemerintah dalam Menunjang Peningkatan Investasi Daerah".

B. Perumusan Masalah

Titik tolak dari jenis penelitian apapun tidak lain bersumber dari masalah. Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Menurut Lexy J. Moleong (2000:77), tujuan perumusan masalah adalah :

> Sekedar sebagai arahan, pembimbing atau acuan pada usaha untuk menentukan masalah yang sebenarnya. Masalah yang sesungguhnya baru akan dapat dirumuskan atau muncul jika penelitian sudah dimulai bahkan pada saat pengumpulan data. Perumusan masalah yang dilakukan itu merupakan aplikasi dari asumsi bahwa suatu penelitian tidak mungkin dimulai dari sesuatu yang kosong.

Sebelum penulis mengemukakan perumusan masalah, terlebih dahulu diketahui mengenai pengertian masalah. Pengertian masalah menurut Winarno Surachman (1989:57) adalah: "Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah itu harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang meski dilalui dengan jalan mengatasi apabila manusia akan jalan terus".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian dari masalah adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan suatu pertanyaan yang perlu untuk diketahui secara mendalam dan diusahakan pemecahannya dengan jalan meneliti dulu permasalahannya dan mencari penyebabnya. Begitu pula dalam pembangunan ekonomi daerah, masalah yang sering dijumpai adalah adanya keterbatasan modal/dana untuk pembangunan disamping keterbatasan lain. Untuk itu diperlukan adanya dinas yang mengatur jalannya proses investasi. Salah satu bagian yang ada di lingkup Pemerintah Kota yang diarahkan untuk menangani hal tersebut adalah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, salah satunya adalah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Dari kondisi yang ada maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana potensi investasi yang terdapat di Kota Probolinggo?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan investasi di Daerah?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis potensi investasi yang terdapat di Kota Probolinggo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan investasi di Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di Kota Probolinggo.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi.
   b. Sebagai tambahan referensi dan wacana bagi peneliti berikutnya yang akan mendalami dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema ini.
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam menangani bidang penanaman modal terutama berkaitan dengan upya peningkatan investasi di daerah, dimana investasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
   b. Sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah dalam Menunjang Peningkatan Investasi Daerah", penulis membagi kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini secara garis besar menggambarkan hal-hal yang mengarah kepada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan analisa-analisa dan interpretasi teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi sebagai dasar dan landasan pijakan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi konsep paradigma administrasi pembangunan, pemerintah daerah, otonomi daerah, investasi dan pembentukan modal pembangunan, serta potensi dan pembangunan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang penyajian data dari hasi penelitian dan analisa serta pembahasan tentang Potensi-potensi Investasi di Kota Probolinggo, Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan investasi di Daerah, Faktor Penghambat Investasi di Kota Probolinggo, serta Faktor Pendukung Investasi di Kota Probolinggo.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, disertai dengan saran dari kesimpulan tersebut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Administrasi Pembangunan

1. Model Administrasi Negara di Negara Berkembang

Menurut Dwight Waldo dalam Tjokroamidjojo (1994:1), administrasi negara (publik) adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan Dimock dalam Tjokroamidjojo (1974:2) menyebutkan bahwa administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Dalam perkembangannya ada empat kecenderungan dasar dalam ilmu administrasi negara sebagaimana telah disebutkan dalam Tjokroamidjojo (1994:7), yaitu:

> Pertama, perhatian administrasi negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Kecenderungan pertama ini banyak didukung oleh pengetahuan kebijaksanaan (*policy sciences)*. Kedua, dalam administrasi negara adalah pendekatan *behavioral (behavioral approach*). Ketiga, pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Keempat, studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kulturil.

Keempat kecenderungan tersebut seringkali saling berkaitan satu sama lain. Kecenderungan yang dikemukakan pertama kali disebut pula sebagai kecenderungan pendekatan atau gagasan administrasi pembangunan.

Pada tahun 1960-an mulai masuk ke Indonesia pikiran-pikiran yang tumbuh dari gagasan administrasi pembangunan. Dan pengaruh dari pikiran tersebut telah menumbuhkan orientasi pemikiran baru mengenai administrasi negara di Indonesia. Konsep administrasi pembangunan lebih mendukung kebutuhan obyektif proses perkembangan di Indonesia tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Tjokroamidjojo (1994:237), “salah satu kecenderungan yang menunjukkan berkembangnya orientasi berdasarkan gagasan administrasi pembangunan terlihat dengan usaha perencanaan penyempurnaan administrasi negara sebagai bagian yang integral dari usaha pembangunan berencana yang menyeluruh”.

Sejak tahun 1966 mulai dirintis pengembangan sistem ekonomi dimana pemerintah merupakan unsur pembangunan (*agent of development*) sebagai interpretasi pelaksanaan demokrasi ekonomi. Perkembangan yang perlu dibina dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan sistem ekonomi sebagai landasan penyempurnaan administrasi pembangunan ialah pembinaan suatu sistem ekonomi pasar yang berencana.

Administrasi pembangunan belumlah diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Dewasa ini perkembangan menuju ke arah itu terlihat dalam berbagai usaha para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan yang diperkembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara. Para ahli-ahli ilmu administrasi negara kemudian memberikan perhatian pula terhadap dua hal yaitu administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisionil agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri). Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai ilmu maupun sebagai praktek di bidang-bidang kehidupan yang lain.

2. Konsep Administrasi Pembangunan

Pada negara berkembang menganut administrasi pembangunan sedangkan pada negara maju menganut administrasi negara baru. Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang sehingga menganut sistem administrasi pembangunan dalam menjalankan aktivitasnya. Istilah Administrasi Pembangunan menurut Siagian (1985:2-3) meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan pembangunan.

> Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building)*.

Dari pengertian administrasi dan pembangunan di atas, maka administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation building*).

Dari pengertian diatas maka Siagian (1985:3-4) menganalisis terdapat beberapa ide pokok yang perlu diperhatikan apabila berbicara tentang pembanguan, yaitu :

a. Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan; dimana proses tersebut terbagi menjadi tahap-tahap yaitu berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
b. Pembangunan merupakan usaha secara sadar dilaksanakan.
c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
d. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara hidup baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensionil. Artinya bahwa modernitas mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan adminstrasi.
f. Kesemua hal yang telah disebutkan diatas ditunjukkan kepada usaha membina bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan pembangunan menyangkut mobilitasi sumber daya manusia, uang, fasilitas dan tindakan pemerintah serta mengalokasikannya dalam kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan teknis dan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam pembangunan. Administrasi pembangunan dirasakan inovatif setelah menaruh perhatian serius pada perubahan sosial diantara sasaran pembangunan yang hendak dicapai. Dengan menaruh perhatian pada aspek sosial, dimana pada aspek sosial ini banyak terdapat masalah, diantaranya masalah

kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain, maka permasalahan yang dihadapi menjadi semakin luas.

3. Ciri-Ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1994:9-10) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tujuh ciri yang ada dalam administrasi pembanguan. Ketujuh ciri tersebut adalah :

a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*commited)* terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif
c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*inovasi)* kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa yang akan datang
d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah
e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri denagn substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang
f. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*)
g. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approac*h), berorientasi pada kegiatan (*action oriented)*, dan bersifat pemecahan masalah *(problem solving*).

Setelah melihat ciri-ciri administrasi pembangunan diatas, Tjokroamidjojo (1994:14) menggambarkan ruang lingkup administrasi pembangunan, yaitu : sebagai penyusun kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara *(the administration of development)* serta perumusan kebijaksanaan- kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of administration*).

Pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang tersebut pada akhirnya melahirkan bermacam-macam paradigma, yaitu :

a. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

Paradigma pertumbuhan memfokuskan diri pada akumulasi kapital nasional, dengan Produk Domestik Bruto *(GNP : Gross National Product)* sebagai ukuran keberhasilan

b. Paradigma Kesejahteraan (*Welfare Paradigm*)

Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan mesin ekonomi nasional.

c. Paradigma Pembangunan Manusia (*People Centerred Development Paradigm)*

Paradigma ini memberikan peranan kepada individu sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka. Oleh karena itu paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri

d. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat (*Public Empowerment Paradigm*)

Dalam paradigma ini masyarakat dilibatkan secara menyeluruh mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Paradigma ini terfokus penguatan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk dapat mengatasi atau memenuhi kebutuhan mereka melalui pengelolaan aset-aset yang ada pada masyarakat.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila menyimak Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa yang disebut Pemerintah Daerah adalah ”penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945".

Pemerintah Daerah sering kali diistilahkan sebagai l*ocal government*. Josef R. Kaho (dalam Jimung, 2005:40) mendefinisikan *local government* adalah :

> "Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan ysng dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah Kekuasaannya."

Sedangkan menurut Hoessin (dalam Muluk 2005:10) mengemukakan bahwa local government merupakan konsep yang mengandung 3 arti, yaitu:

1. berarti pemerintah lokal yang sering kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah
2. mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pemerintah lokal (mengacu pada fungsi)
3. bermakna daerah otonom.

Secara historis, istilah *local government* di Indonesia pernah dikenal dengan daerah swatantra, yang sekarang ini dikenal dengan pemerintah daerah. Pemerintahan umum pusat di daerah pada masa kemerdekaan disebut pamong praja. Pemerintahan khusus pusat di daerah dalam keseharian disebut jawatan atau dinas pusat di daerah atau dinas vertikal. Jadi pemerintahan lokal tidaklah sama dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan lokal meliputi pamong praja, jawatan vertikal dan pemerintahan daerah.

Perlu diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban (sebagai daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan. Adapun kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini

adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat meliputi :

1 politik luar negeri
2 pertahanan
3 keamanan
4 yustisi
5 moneter dan fiskal nasional
6 agama.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteris eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. Adapun hubungan antarsusunan pemerintahan tersebut meliputi hubungan antarprovinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

1 perencanaan dan pengendalian pembangunan
2 perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentuan masyarakat
4 penyediaan sarana dan prasarana umum
5 penanganan bidang kesehatan

6 penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7 penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
8 pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
9 fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
10 pengendalian lingkungan hidup
11 pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
12 pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13 pelayanan administrasi umum pemerintahan
14 pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
15 penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
16 urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perunddang-undangan.

3. Desentralisasi

Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi perundangan (*regeling*) dan pemerintahan (*bestuur*). Desentralisasi tersebut diatur dalam pasal 18 UUD Tahun 1945. Namun demikian, desentralisasi dari sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *"de"* atau lepas dan *"centrum"* atau pusat sehingga desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Hal ini menurut Supriatna (1996:1), berarti bahwa adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat dengan tetap adanya hubungan pusat dengan bagian atau bawahannya.

Di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi juga adalah cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Menurut J.H.A. Logeman (dalam Supriatna 1996:1), desentralisasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau "*ambtelijke decentralisatie*" yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan;
b) Desentralisasi ketatanegaraan atau "*staatkundige decentralisatie*" yang sering juga disebut desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*reglende en bestuurende bevoerheid*) kepada daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan dengan batas wilayah daerah masing-masing.

Selanjutnya ada juga yang menyebutkan definisi desentralisasi dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu Kelompok Anglo Saxon dan Kelompok Kontinental.

a. Kelompok Anglo Saxon

Kelompok Anglo Saxon menurt Kaho (dalam Jimung, 2005:29) mendefinisikan desentalisasi sebagai: "Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut devolusi".

Devolusi diartikan sebagai pemberian sebagian kekuasaan yang diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun sacara administratif.

Sementara itu menurut Corolie Bryant dan Louis G. With (dalam Jimung 2005:29), menegaskan bahwa desentralisasi adalah "Transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik".

Desentralisasi administrasi merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat ditingkat lokal. Sebaliknya desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal, dengan tujuan untuk pemberdayaan lokal.

b. Kelompok Kontinental

Menurut R. Tresna (dalam Jimung 2005:30), membedakan desentralisasi atas dua bagian, yakni: "*Amtalijke decentralitie*" (desentralisasi jabatan) atau dekonsentrasi dan "*staatskundige decentralitie*" (desentralisasi ketatanegaraan) yang dibagi lagi ke dalam desentralisasi teritorial dan desentralisaasi fungsional.

Desentralisasi jabatan adalah pemberian atau penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata-mata. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Sebaliknya Menurut Amran Muslimin (dalam Jimung 2005:30), tidak memasukkan dekonsentrasi sebagai salah satu jenis dari desentralisasi, desentralisasi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2) Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu.
3) Desentralisasi kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama dan sebagainya.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Yudoyono 2001:20), mendefinisikan desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkhis. Sedangkan Rondinelli (dalam Yudoyono 2001:20) menjelaskan bahwa:

> "Desentralisasi dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta".

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan pada pemerintah daerah, mengenai alasan-alasan ini The Liang Gie (dalam Kaho 2005:8-9), menyatakan sebagai berikut:

1) Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (*game teory*). Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegaah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2) Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3) Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
4) Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan dan latar belakang sejarahnya.
5) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Selanjutnya menurut Mariun (dalam Kaho 2005:10) menyebutkan alasan dianutnya desentralisasi adalah:

1) Demi tercapainya efektivitas pemerintahan.
2) Demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (*grassroots democracy)*.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Supriatna (1996:3**),** istilah otonomi atau berasal dari bahasa Yunani (*autos* = sendiri) dan (*nomos* = undang-undang) yang berarti perundangan sendiri (*zelfwetgeving)*. Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di

Indonesia, otonomi selain mengandung arti "perundangan" (*regeling)*, mengandung arti pula "pemerintahan" *(bestuur*).

Menurut Priyatmoko (dalam Mongid 2000:15), mengartikan otonomi sebagai:

> (a) rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, (b) pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya, (c) pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagai komponen dalam masyarakat, dan (d) terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengoreksi ke arah penyelenggaraan *good and clean governance*, (e) rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama, (f) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif.

Widjaja (2002:76), mengartikan otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Supriatna (1996:3), pada prinsipnya luasnya atau batasnya rumah tangga sesuatu daerah itu dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

1) Dari sudut tetorium, luasnya kekuasaan otonomi sesuatu daerah otonom itu terbatas sampai wilayahnya saja. Diluar batas wilayahnya, daerah otonom tidak mempunyai kekuasaan meskipun terhaddap seseorang penduduknya sendiri, akan tetapi berada di luar batas daerahnya.

2) Dari sudut materie, maka isi dan luas rumah tangga daerah itu tergantung dari sistem rumah tangga yang digunakan.

Jadi secara universal otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar
2) Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya
3) Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangannya dalam membiayai kegiatan rumah pemerintahannya
4) Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Diberikannya hak dan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada badan-badan otonomi seperti propinsi, kabupaten atau kota maka badan-badan tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan perundangan yang lebih tinggi dan mampu menjelaskan penyelenggaraan kepentingan-kepentingan umum.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah tersebut segala urusan daerah menjadi kewenangan penyelenggara pemerintah daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan wujud kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang desentralistik, yang berarti adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah, yaitu mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah

dengan lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Jadi kebijakan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu, dalam UU No. 32 Tahun 2004 telah diatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 7 dalam undang-undang ini, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Sedangkan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sendiri (Pasal 11 UU No. 32 Tahun 2004) adalah meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dalam menyelenggarakan kewenangan-kewenangan tersebut tentunya memerlukan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah, sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah
    1. Hasil pajak daerah
    2. Hasil retribusi daerah
    3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
    4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
b. Dana Perimbangan

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sesuai dengan prinsip kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka Daerah juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan diberikan otonomi daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah termasuk didalamnya dalam rangka pembangunan nasional.

Menurut Widjaja (2002:76), tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memberikan otonomi kepada daerah, khususnya Kabupaten/Kota ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula dapat terciptanya cara pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah.

Pada Penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa selain prinsip otonomi seluas-luasnya juga diterapkan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

"Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional".

Prinsip yang sama tentang pelaksanaan otonomi daerah juga diungkapkan dalam Kansil dan Kansil (2004:8) adalah prisip Otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab, yakni dijelaskan sebagai berikut:

> "Prinsip otonomi yang Nyata berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasar pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan prinsip otonomi yang Bertanggung Jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:
> 1) Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah bangsa;
> 2) Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan;
> 3) Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
> 4) Terjaminnya keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
> 5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah".

Dari pernyataan diatas bahwa prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian kewenangan daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri diluar urusan Pemerintah Pusat, selain itu prinsip yang digunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab yang

ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat tetapi tetap terjaminnya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain prinsip tersebut, hal yang mendasar dari diberikannya otonomi kepada daerah adalah dengan tujuan agar daerah-daerah berorientasi pada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah boleh condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya ada beberapa faktor dan syarat yang perlu mendapat perhatian. Kaho (2005:66) beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

a. Manusia pelaksananya harus baik
b. Keuangannya harus cukup dan baik
c. Peralatannya harus cukup dan baik
d. Organisasi dan manajemennya harus baik.

Faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik merupakan faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mekanisme sistem pemerintahan baik daerah maupun pusat akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkan baik pula. Pengertian baik disini meliputi: 1) mentalitasnya/moralitasnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat, 2) memiliki kecakapan/kemampuan tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena setiap kegiatan pemerintahan selalu membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia maka semakin banyak kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Selain itu semakin baik pengelolaannya maka semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah karena pengendalian keuangan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan kemakmuran daerah tersebut dan anggaran yang merupakan alat utama pada pengendalian keuangan daerah harus tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang didasarkan pada pandangan ke depan yang lebih bijaksana. Dengan demikian untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan dapat melaksanakan otonomi daerah maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik, seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, transportasi dan sebagainya. Peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya.

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang baik pula. Manajemen pemerintahan daerah yang baik tergantung pada kepala daerah dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

5. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator,

dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Arsyad (1999:120-121), peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Entrepreneur
   Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
2. Koordinator
   Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevalusian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum dari daerahnya.
3. Fasilitator
   Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah *(zoning)* yang lebih baik.
4. Stimulator
   Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah. Salah satu diantaranya adalah menstimulasi kondisi untuk menarik masuknya investor ke suatu daerah dan

mempertahankan investor yang telah ada untuk terus mengembangkan investasinya.

Untuk menangani berbagai urusan di daerah, pemerintah telah mendesentralisasikan berbagai urusan pada pemerintah daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana tertuang dalam PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dimana terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan diantaranya :

a. Urusan wajib sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib meliputi : pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan.
b. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian.

D. Investasi dan Pembentukan Modal Pembangunan

1. Pengertian Investasi

Secara luas, pengertian investasi dijelaskan dalam Todaro (1995:99), yaitu bahwa investasi mengandung pengertian sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang atau pengalokasian sumber daya “riil” yang ada sekarang (tanah, tenaga kerja, modal, bahan mentah produksi, manajemen dan lain sebagainya).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan antara pengertian investasi dan penanaman modal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan pengertian penanaman modal adalah penyertaan modal dalam badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996:386).

Sedangkan menurut Kamus Lengkap Ekonomi, yang dimaksud dengan investasi (*investment)* adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk pembelian surat-surat berharga (*finansial securities*) seperti efek *(stocks)* dan saham (*shares),* juga disebut investasi keuangan. Portofolio investasi dilakukan oleh perseorangan, perusahaan dan lembaga keuangan yang mengharapkan penerimaan dalam bentuk bunga (*interest)* atau deviden, atau peningkatan nilai dari surat-surat berharga tersebut.
2. Pengeluaran modal untuk pembelian asset fisik seperti pabrik, mesin dan peralatan (investasi tetap (fixed investment)) dan persediaan (stocks) (investasi persediaan (inventory investment)), yaitu investasi fisik atau riil. Dalam analisis ekonomi, istilah investasi khususnya dihubungkan dengan investasi fisik. Investasi fisik menciptakan asset baru yang akan menambah kapasitas produksi suatu negara, sementara investasi keuangan hanya memindahkan kepemilikan dari asset yang sudah ada dari seseorang atau lembaga kepada yang lain (Christopher Pass, Bryan Lowes, 1998:330).

Penjelasan lain menurut Sumartono (1988:14) menyebutkan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Menurut Sukirno (1995:107), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam pengertian ini yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran atau perbelanjaan yang berikut :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.

2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Dari beberapa pengertian investasi yang telah disebutkan di atas dapat kita pahami berdasarkan teori ekonomi bahwa dari segi bentuknya investasi terdiri dari investasi langsung atau disebut juga investasi fisik atau riil dan investasi tidak langsung atau disebut juga investasi keuangan, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai penanaman modal. Walaupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dibedakan antara pengertian investasi dan penanaman modal, namun sebenarnya istilah investasi dan penanaman modal adalah sama. Hanya perlu pemilihan kata yang tepat dalam penggunaannya sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik secara langsung dalam bentuk investasi fisik maupun secara tidak langsung dalam bentuk investasi keuangan (investasi finansial) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2002:187), dari segi subyeknya atau pelaku investasi, investasi dapat dibedakan menjadi:

1. Investasi Pemerintah

Dimana investasi pemerintah lebih ditujukan untuk kebutuhan sosial, seperti untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Berkaitan dengan anggaran belanja daerah, investasi pemerintah termasuk dalam belanja modal/pembangunan (*Capital/Investment Expenditure).*

2. Investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam hal ini disebut juga investasi swasta dalam negeri. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan modal dalam negeri, yaitu bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak termasuk dalam modal

asing, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

3. Investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi asing menurut Jhingan (1992:608) juga terdiri dari penanaman modal asing swasta dan penanaman modal asing negara. Penanaman modal asing swasta dapat berbentuk investasi langsung dan tidak langsung, sedangkan penanaman modal asing negara biasanya berupa bantuan luar negeri.

Sedangkan Penanaman Modal Asing yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung dan yang digunakan untuk mernjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian modal asing yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah:

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dari ketiga jenis investasi atau penanaman modal tersebut, yang termasuk dalam pembahasan disini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berbentuk investasi langsung (investasi fisik), sebagaimana investasi yang ditangani dalam Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) dan sesuai dengan analisa ekonomi yang telah disebutkan diatas bahwa istilah investasi khususnya dihubungkan dengan investasi fisik. Investasi fisik menciptakan asset baru yang akan menambah kapasitas produksi suatu negara, sementara investasi keuangan hanya memindahkan kepemilikan dari asset yang sudah ada dari seseorang atau lembaga kepada yang lain.

2. Bentuk-bentuk Investasi

Ada berbagai macam bentuk-bentuk investasi, yaitu:

1. Menurut Jogiyanto (2000:7-11), bentuk-bentuk investasi adalah:

   a. Investasi langsung

      Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang, atau pasar modal. Contoh investasi langsung adalah Tabungan.

   b. Investasi tidak langsung

      Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan.

2. Bentuk-bentuk investasi dibagi dalam:

   a. Investasi tanah diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah : harga tanah akan meningkat di masa depan.
   b. Investasi pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar
   c. Investasi saham diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau penelitian. (www.wikipedia.com)

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

Menurut sebuah studi yang disebutkan dalam Dumairy (1996:154-155), bahwa faktor-faktor yang menentukan investasi swasta di Indonesia meliputi:

1. Variabel-variabel Produk Domestik Bruto
   Kenaikan produk domestik bruto, yang berarti kenaikan permintaan agregat, merangsang kalangan pengusaha untuk melakukan investasi lebih besar.
2. Tingkat Suku Bunga
   Kenaikan tingkat suku bunga di dalam negeri akan mengakibatkan realisasi PMDN dan PMA berkurang dengan prosentase lebih besar. Sebaliknya kenaikan suku bunga di luar negeri akan berdampak positif bagi investasi swasta di Indonesia.
3. Jumlah Uang Beredar

Harga-harga yang membumbung akan memancing ekspansi uang beredar, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan akan mata uang rupiah, sehingga membuat investor enggan untuk menanamkan modal.

4. Pengeluaran Pemerintah
   Pengeluaran Pemerintah yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, berperan penting sebagai motor penggerak investasi di Indonesia.
5. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Deregulasi Pemerintah
   Penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk menarik minat investor untuk menanamkan modal.

Penjelasan lain disebutkan dalam Sukirno (1995:109), bahwa faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Dalam Mardiasmo (2002:59), disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat investasi di daerah adalah ada tidaknya iklim yang kondusif dalam berinvestasi. Iklim yang kondusif tersebut dipengaruhi oleh adanya jaminan keamanan, kepastian hukum, terjaminnya *property right* dan *contrac right*, kemudahan prosedur administrasi (birokrasi), dan peraturan perpajakan daerah yang menarik bagi dunia usaha.

Kemudahan sistem perpajakan merupakan salah satu faktor penarik bagi investor untk melakukan investasi di suatu daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2002:149), bahwa investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah, sehingga penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan, misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Sedangkan pengaruh pajak terhadap perilaku investasi dapat dilihat dari tiga pendekatan utama, sebagaimana disebutkan dalam Musgrave (1991:325), yaitu sebagai berikut:

1. Investasi dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat pengembalian (tingkat hasil) bersih yang diharapkan.

Mencerminkan hipotesis perilaku maksimisasi laba, investor akan menanamkan modalnya sampai suatu titik dimana nilai sekarang *(present value)* dari arus pendapatan yang diharapkan sama dengan biaya. Dalam hal ini, pajak atas laba akan berpengaruh dengan cara menurunkan tingkat pengembalian bersih yang akan diharapkan.

2. Investasi dianggap sebagai fungsi dari perubahan penjualan masa lalu dan sebagai fungsi dari kapasitas yang ada yang sesuai dengan penjualan.

   Investasi bereaksi terhadap kebutuhan akan naiknya kapasitas yang disebabkan oleh kenaikan penjualan pada masa lalu, yang disebut pengaruh akselerator. Disini, pengaruh utama perpajakan terjadi melalui pengaruhnya terhadap penjualan, yang mencakup penjualan kepada konsumen dan pemerintah.

3. Investasi merupakan fungsi dari dana internal *(internal fund*) yang tersedia, termasuk laba setelah pajak dan beban penyusutan.

   Keinginan untuk investasi dipengaruhi oleh ketersediaan dan internal, pajak masuk melalui pengaruhnya terhadap arus dana tersebut, entah itu dalam bentuk cadangan penyusutan ataupun laba ditahan.

Dari beberapa sudut pandang yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat investasi di suatu daerah atau negara dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan meliputi faktor ekonomi, sosial dan politik.

4. Pentingnya Pembentukan Modal dalam Pembangunan

Telah diungkapkan oleh hampir semua ahli ekonomi bahwa pembentukan modal sangat penting dalam pembangunan ekonomi sebagai salah satu dan sekaligus faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut Nurkse (dalam Jhingan 1992:419), pengertian pembentukan modal adalah:

> Bahwa masyarakat tidak menggunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal : perkakas, dan alat-alat, mesin dan fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya, segala macam bentuk modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Intinya adalah pengambilalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal, sehingga memungkinkan perluasan *output* yang dapat dikonsumsi pada masa depan.

Pengertian pembentukan modal yang lebih lengkap dijelaskan menurut Singer (dalam Jhingan 1992:419-420), bahwa:

> Pembentukan modal domestik tidak hanya mencakup biaya untuk konstruksi, peralatan dan persediaan dalam negeri, tetapi juga pengeluaran lain, kecuali pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan *output* pada tingkat yang ada. Ia juga mencakup pembiayaan untuk pendidikan, rekreasi dan barang mewah, yang memberikan kesejahteraan dan produktivitas lebih pada individu dan semua pengeluaran masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan moral penduduk yang bekerja.

Pentingnya pembentukan modal sebagaimana dijelaskan berdasarkan analisa Nurkse (dalam Jhingan 1992:420-423), bahwa pemutusan lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang atau negara berkembang melalui pembentukan modal, adalah sebagai berikut:

(1) Pembangunan ekonomi pada hakikatnya penciptaan modal *overhead* sosial (untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya) dan ekonomi (meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, dan industri) hanya dapat dicapai jika laju pembentukan modal di dalam negara cukup cepat, yaitu jika bagian dari pendapatan atau *output* masyarakat yang ada hanya sedikit saja yang digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung dan diinvestasikan dalam peralatan modal, (2) Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Pembentukan modal memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin singkat. Jadi pembentukan modal juga menguntungkan buruh, (3) Pembentukan modal menciptakan perluasan pasar. Dia yang membantu menyingkirkan ketidaksempurnaan pasar melalui penciptaan modal *overhead* sosial dan ekonomi, jadi memotong lingkaran setan kemiskinan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, (4) Pembentukan modal membuat pembangunan menjadi mungkin kendati, dengan penduduk yang meningkat. Di negara terbelakang berpenduduk padat kenaikan *output* per kapita berkaitan dengan rasio modal-buruh. Tetapi negara-negara yang bermaksud meningkatkan

rasio modal-buruh akan menghadapi dua masalah, *pertama*, rasio modal-buruh jatuh akibat naiknya penduduk sehingga diperlukan investasi netto yang besar untuk mengatasi kemerosotan rasio tersebut, *kedua*, pada waktu penduduk meningkat dengan pesat, menjadi sulit untuk mendapatkan tabungan yang cukup untuk memperoleh sejumlah investasi yang diperlukan. Sebabnya ialah rendahnya pendapatan per kapita yang membuat kecenderungan marjinal menabung tetap rendah. Satu-satunya pemecahan atas masalah itu ialah mempertinggi laju pembentukan modal, (5) Negara terbelakang biasanya menghadapi masalah neraca pembayaran sebab kebanyakan mengekspor barang primer seperti bahan mentah dan hasil pertanian, dan mengimpor hampir semua jenis barang manufaktur, setengah manufaktur dan barang modal. Pembentukan modal domestik merupakan salah satu cara pemecahan pokok kesulitan neraca pembayaran ini. Dengan mendirikan industri pengganti impor, impor atas barang-barang tersebut dapat dikurangi dan dengan meningkatnya produksi segala macam barang konsumsi dan barang modal, komposisi ekspor menjadi berubah. Bersama dengan hasil pertanian dan bahan mentah industri, ekspor barang manufaktur juga bermula. Jadi pembentukan modal membantu memecahkan masalah neraca pembayaran.

(6) Laju pembentukan modal yang cepat lambat laun mengurangi kebutuhan akan modal asing. Pembentukan modal dapat membantu tercapainya swasembada suatu negara dan mengurangi beban utang luar negeri, (7) Dengan meningkatnya laju pembentukan modal *output* produk pertanian dan barang konsumsi manufaktur cenderung meningkat. Pada pihak lain, bila dengan pembentukan modal pendapatan lalu naik, kenaikan ini akan menaikkan permintaan barang. Dalam jangka pendek, tidak mungkin untuk memenuhi yang meningkat ini dengan menambah penawaran dan ini berakibat pada memberatnya tekanan inflasi pada perekonomian, tetapi peningkatan yang mantap pada tingkat pembentukan modal dalam jangka panjang memperbesar penawaran barang-barang, mengendalikan inflasi dan menciptakan kestabilan ekonomi, (8) Pembentukan modal juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Kalau pembentukan modal menyebabkan penggunaan sumber alam secara tepat dan pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan

berbagai macam kebutuhan masyarakat terpenuhi. Mereka menikmati berbagai macam komoditi, standar hidup meningkat, juga kesejahteraan ekonomi, (9) Proses pembentukan modal tersebut membantu menaikkan *output* yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional. Jadi kenaikan laju dan tingkat pendapatan nasional tergantung pada kenaikan laju pembentukan modal.

Kutipan di atas merupakan kutipan tidak langsung karena uraian yang asli ada perubahan. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pembentukan modal sangat berarti dalam kelangsungan pembangunan ekonomi dan manfaat dari pembentukan modal tersebut tidak saja dirasakan dalam satu aspek saja tetapi dapat menimbulkan *multiplier effect* yang besar. Salah satu faktor terpenting dalam pembentukan modal tersebut adalah dengan meningkatkan investasi.

Selain memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam pembentukan modal, keberadaan investasi atau penanaman modal, baik PMDN maupun PMA juga dapat memberikan manfaat yang secara langsung dapat dirasakan, seperti adanya alih teknologi dan perluasan kesempatan kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan atau Penyempurnaan Undang-undang Penanaman Modal oleh Pandjaitan, dkk., (1995:6), bahwa pentingnya peranan penanaman modal bagi peningkatan hasil produksi karena dengan adanya penanaman modal, baik PMDN maupun PMA, memberikan antara lain alih teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

E. Potensi dan Pembangunan Daerah

1. Potensi Daerah

Potensi daerah apabila dimanfaatkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjito (dalam Moeljaningsih 2003:45):

> Pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dan diamati dengan melalui berbagai cara. Pengertian pertumbuhan secara implisit menyatakan perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam masyarakat baik yang menyangkut kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi.

Potensi daerah dapat meliputi bidang sosial, ekonomi maupun fisik suatu daerah. Daerah hendaknya mengetahui potensi unggulan yang akan dikembangkan sehingga ada kekhasan tersendiri yang tidak ada di daerah lain sehingga sektor unggulan tadi bisa menjadi kegiatan basis.

Potensi unggulan di Kota Probolinggo meliputi beberapa sektor, diantaranya di bidang industri, perdagangan, perikanan, pelabuhan, dan perkebunan. Kebijaksanaan pembangunan bidang usaha industri yang ditempuh oleh pemerintah adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya industri-industri yang efisien dengan sejauh mungkin memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang berdaya saing kuat baik dari segi mutu maupun harga produknya. Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut, maka pemerintah memprioritaskan pengembangan bidang usaha industri yang meliputi pengembangan industri yang berorientasi ekspor sebagai penggerak utama dalam laju pertumbuhan ekonomi serta pengembangan industri kecil termasuk kerajinan rakyat dalam upaya menciptakan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja. Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan tentang pengusahaan kawasan industri yakni dengan Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri dan Keppres Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keprluan Kawasan Industri. Menurut Aminuddin Ilmar (2007:113), “Keuntungan yang dapat diperoleh bagi penanaman modal yang berlokasi di dalam kawasan industri adalah tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari lokasi atau lahan usahanya serta perizinan yang dibutuhkan dalam rangka aplikasinya itu kesemuanya diurus oleh kawasan industri yang bersangkutan”.

Menurut Aminuddin Ilmar (2007:116), Kebijaksanaan pembangunan di bidang perdagangan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri sehingga dapat mendorong arus kelancaran barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak, menciptakan iklim persaingan yang sehat, menunjang usaha peningkatan efisiensi produksi, membangunkan ekspor, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan rakyat serta memantapkan stabilitas ekonomi.

Penanaman modal di bidang usaha perikanan diharapkan ikut membantu pengembangan usaha petani nelayan di sekitarnya, baik melalui kelompok petani nelayan maupun koperasi dalam kegiatan produksi, penampungan, pengolahan dan pemasaran hasil. Bidang usaha perikanan meliputi usaha-usaha penangkapan, pemeliharaan (budi daya), pengolahan, dan pemasaran hasil serta usaha penunjang dan dapat merupakan usaha perikanan terpadu. Yakni mulai dari penangkapan, pengolahan dengan dukungan *colt storage* sampai kepada pemasaran produksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Usaha Perikanan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Penanaman modal di bidang usaha perkebunan diharapkan dapat membantu pengembangan perkebunan rakyat di sekitarnya, dengan melibatkan kelompok tani maupun koperasi dalam kegiatan produksi, penampungan, pengolahan dan pemasaran hasil. Bentuk usaha diutamakan dengan pola usaha Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan mengikutsertakan koperasi kelompok-kelompok petani sebagai pemegang saham.

Bertambahnya kegiatan basis akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis.

Menurut Kozlouski (dalam Sujarto 1992:72), pemanfaatan potensi daerah sangat penting dalam pembangunan daerah, karena “Salah satu usaha yang esensial dalam perencanaan tingkat nasional, regional maupun lokal adalah menetapkan kemungkinan pengembangan yang pada prioritas teratas harus mengacu pada usaha pemanfaatan paling efisien dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia”.

Menurut Sulistyo (2004) dalam pengembangan potensi daerah terdapat model-model pengembangan potensi daerah, yaitu:

1. Model pengembangan potensi dilakukan atas dasar kebutuhan daerah

Pengembangan produk bukan saja yang ada di daerah yang bersangkutan tetapi yang tidak ada di daerah itu tapi dibutuhkan oleh masyarakat daerah yang bersangkutan.

2. Model pengembangan potensi dilakukan atas dasar kebutuhan konsumen

   Pengembangan potensi menggunakan model integrasi dan kesinambungan sesuai dengan logika dan prinsip hukum ekonomi permintaan dan penawaran, yaitu memenuhi konsumen.

3. Model pengembangan potensi dilakukan atas dasar potensi komersial

   Model pengembangan potensi difokuskan pada potensi komersial yang memiliki nilai ekonomi dan industri tinggi terutama pada sektor *agrarian industry*, pertambangan, kehutanan dan perikanan yang didukung perdagangan, industri dan pariwisata.

4. Model pengembangan potensi dilakukan atas dasar kebutuhan investor

   Model pengembangan potensi yang didasarkan pada kebutuhan dan peluang yang muncul saat itu baik tingkat lokal, nasional, dan dunia sehingga metode keunggulan komparatif dan potensial industri baru harus dideteksi sedini mungkin.

5. Model pengembangan potensi dilakukan atas dasar tuntutan jaman atau sering disebut globalisasi

   Model pengembangan potensi yang didasarkan pada perhitungan global dan terfokus pada upaya bagaimana persaingan total di era global sehingga harus menyiapkan diri di semua aspek.

6. Model pengembangan potensi didasarkan pada tuntutan publik

   Model pengembangan potensi yang didasarkan pada pertimbangan publik setempat sehingga semua potensi yang ada baik manusia dan alam maupun produk harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan menguntungkan publik baik secara ekonomi maupun teknis.

2. Pembangunan Daerah

a. Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah menurut Piran, I Made dan Darma (2001:2) adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat

daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan daerah dan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional dan global. Pengertian daerah disini mencakup daerah Kabupaten/Kotadan Daerah propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom.

Menurut Nugroho Iwan dan Dahuri Rochnin (2004:189), pembangunan daerah disertai dengan otonomi sangat relevan dengan pembangunan secara menyeluruh karena beberapa alasan, antara lain *: Pertama*; pembangunan daerah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengolahan sumber-sumber daya publik, *kedua*; pembangunan daerah yakni mampu memenuhi harapan keadilan ekonomi bagi sebagian banyak orang, selanjutnya dengan didukung kewenangan yang lebih luas dalam pembiayaan, daerah dapat menggali potensinya dalam rangka menyerasikan pembangunan kota dan desa, *ketiga*; pembangunan daerah dapat menurunkan biaya-biaya transaksi, *keempat*; dapat meningkatkan daya beli domestik.

Empat alasan diatas memiliki makna strategis dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerah utamanya di desa. Hal tersebut tidak hanya terjadi karena sumber permasalahan lebih banyak di pedesaan secara fisik tetapi pedesaan juga menyimpan nilai lokal yang perlu diberi peluang untuk berkembang memanfaatkan sumber-sumber daya alam melalui otonomi daerah (pembangunan biososial). Itulah sebabnya menjadi penting bahwa pembangunan daerah memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terpadu secara spasial dan akumulatif. Dengan pemikiran kebijakan program pembangunan daerah disusun tidak hanya dapat memberi panduan yang terarah dan efisien bagi pemecahan masalah tetapi lebih jauh memberi jaminan akan keberlanjutan sistem produksi dalam wilayah. Karena yang sering terjadi kelemahan pembangunan seringkali terlihat, hal ini tidak tampak dari kecil-kecil pembangunan dan komitmen antara rumusan dan implementasi kebijakan.

Dari pengertian diatas menurut Piran, I Made dan Darma (2001:7) dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan daerah adalah kesatuan dari semua kegiatan pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun oleh swadaya masyarakat.

b. Tujuan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia adalah otonomi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan, sesuai dengan keragaman keadaan ekonomi, sosial dan budaya masing-masing daerah serta otonomi politik terbatas untuk membina rakyat dan masyarakat luas agar lebih memahami pengertian bernegara dan kesadaran sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang pembangunan daerah semua aparat pemerintah yang bertugas di daerah berada di bawah koordinasi Kepala Pemerintahan Daerah. Dengan pertimbangan tersebut maka menurut Piran, I Made dan Darma (2001:5-6), tujuan pembangunan daerah secara umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mandiri dan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan keadaan sosial daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial secara adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat di daerah.
3. Mengembangkan setiap ragam budaya daerah sehingga menjamin kelestarian budaya daerah diantara budaya-budaya nasional Indonesia lainnya.
4. Meningkatkan dan memelihara keamanan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat seutuhnya.
5. Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

c. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah yang dipilih seharusnya merupakan tata cara yang paling baik untuk:

1. Meningkatkan produktivitas daerah, sektor dan nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja yang layak untuk mengatasi pengangguran.
3. Mengatasi kekurangan modal yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan.
4. Memperluas daya serap pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Meningkatkan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah secara lebih merata.
6. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan berusaha bagi masyarakat luas terutama usaha kecil dan menengah.

7. Meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman rakyat, melalui penyediaan keperluan hidup, pendidikan, kesehatan, serta penegakan keadilan dan keamanan.
8. Melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
9. Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya.
10. Menjamin kelangsungan pembangunan yang menyeluruh.

Alasan di atas sering dipergunakan untuk menentukan strategi pembanguan pada umumnya adalah salah satu atau beberapa dari pertimbangan berikut :

1. Pelaksanaannya lebih mudah, cukup pemerintah daerah menawarkan kepada investor besar disertai tawaran untuk memperoleh berbagai kemudahan, diantaranya, pajak yang lebih rendah, mudah mendapatkan sarana dan bahkan sarana umum secara cuma-cuma.
2. Lebih cepat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Cepat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
4. Resiko yang ditanggung oleh pemerintah hampir tidak ada atau sangat kecil.
5. Lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada semua sektor.
6. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia daerah.

Pembangunan daerah-daerah yang memiliki letak dan peranan lebih sebagai pasar atau sarana prasarana pemasaran hasil-hasil dari daerah lain, lebih disarankan untuk menyediakan sarana prasarana yang lebih baik serta dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari penyediaan sarana tersebut.

Untuk mempercepat pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu menentukan strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, budaya dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari pembangunan di daerah pedesaan. Adapun yang dimaksud daerah pedesaan adalah daerah dimana penghasilan utama berasal dari usaha pada bidang pertanian.

Berikut merupakan strategi pembangunan daerah pedesaan pada umumnya menurut Piran, I Made dan Darma (2001:43-47):

1. Meningkatkan pengelolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, sesuai dengan kaedah teknis pengelolahan sumberdaya alam masing-masing.
2. Meningkatkan pertanian pangan dan bahan industri yang sesuai dengan keadaan lahan dan keperluan pasar.
3. Meningkatkan sarana perhubungan untuk kegiatan ekonomi, terutama jalan dan sarana angkutan.
4. Membantu peningkatan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi daerah yang sukar dicapai serta meningkatkan hubungan keluar daerah tersebut.
5. Lebih mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Dengan strategi tersebut, apabila berjalan baik maka daerah-daerah lain akan tumbuh untuk mengimbanginya.

d. Faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah

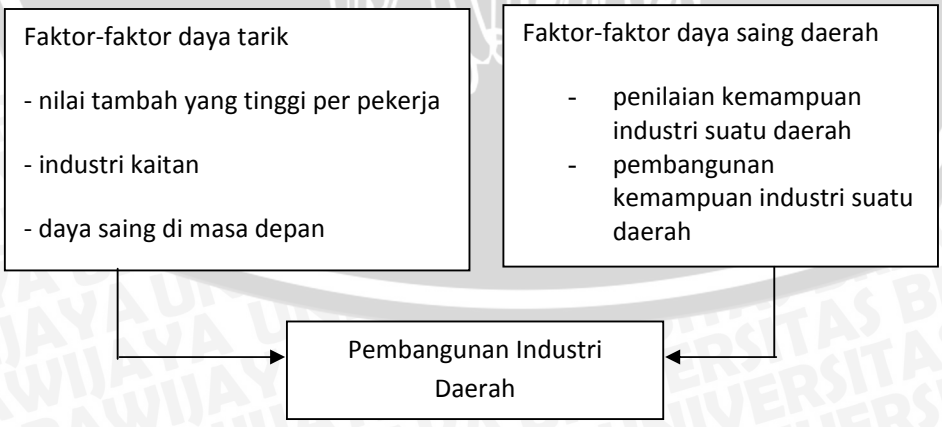

Sumber : Tambunan (2003:289)

Faktor-faktor daya tarik, yaitu:

1. Nilai tambah yang tinggi per pekerja (produktivitas)

   Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap pembentukan PDRB.

2. Industri kaitan

   Ini berarti perkembangan industri-industri tersebut akan meningkatkan total nilai tambah daerah atau mengurangi "kebocoran ekonomi" dan ketergantungan impor.

3. Daya saing di masa depan

   Hal ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan.

4. Spesialisasi industri

   Sesuai dasar pemikiran teori-teori klasik mengenai perdagangan internasional, suatu daerah sebaiknya berspesialisasi pada industri di mana daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif.

5. Potensi ekspor

   Industri daerah tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah yang bersangkutan akan tetapi juga mampu menjangkau kebutuhan di luar daerah.

Faktor-faktor daya saing daerah

1. Penilaian kemampuan industri suatu daerah

   Industri yang memiliki kemampuan lebih unggul akan mampu bersaing dengan industri sejenis yang ada di daerah lain.

2. Pembangunan kemampuan industri suatu daerah

   Untuk mencapai keunggulan, pemerintah daerah harus mendorong peningkatan kemampuan industri dengan pembinaan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan rangsangan positif.

3. Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Keberadaan investasi di Daerah dan peranan penting investasi tersebut bagi Daerah yang bersangkutan telah digambarkan dalam beberapa teori ekonomi terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Beberapa teori tersebut sebagaimana disebutkan dalam Arsyad (1999:116-118), adalah sebagai berikut:

1. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)
   Teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja *(job creation).* Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan *(aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai dasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan yang akan didirikan di daerah tersebut. Walaupun dalam teori ini terdapat kelemahan, yaitu karena model ini didasarkan pada permintaan eksternal sehingga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi pada kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global, namun model ini berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.
2. Teori Lokasi
   Teori ini menyatakan bahwa berkaitan dengan pengembangan kawasan industri, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah adalah faktor lokasi. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pembangunan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut, oleh karena itu, seringkali masyarakat berusaha memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri.
3. Model Daya Tarik *(Attraction)*

Model daya tarik industri ini berdasarkan teori ekonomi yang menyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

4. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali

ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap daerah dengan segala keterbatasannya sangat memerlukan dukungan dari pihak luar seperti investor untuk memenuhi kebutuhan akan modal untuk pembangunan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas dan keaktifan dari pemerintah daerah sendiri dalam mengupayakan hal-hal untuk dapat menarik investor agar menanamkan modal di daerah.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian sehingga agar penelitiannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan menggunakan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan. Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan pengertian penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1988:8), diartikan sebagai berikut:

> ”Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Hasil akhirnya pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya.”

Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2005:63) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan menurut Sevila dkk (1993:71) metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang barjalan dari pokok suatu penelitian.

Definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2000:3) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.

B. Fokus Penelitian

Yang dimaksud dengan fokus penelitian menurut Moleong (2000:62) adalah masalah yang timbul dalam penelitian yang sekaligus membatasi studi dalam penelitian dan berkaitan dengan proses inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan informasi atau data yang diperoleh di lapangan sehingga pembahasan tidak melebar tetapi lebih efektif dan efisien. Fokus penelitian berupa rumusan yang terdiri dari dua faktor atau lebih yang saling berkaitan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi Investasi yang terdapat di Kota Probolinggo
   a. Sektor Industri dan Perdagangan
      (a) Industri Besar dan Industri Kecil
      (b) Perusahaan Besar, Menengah, dan Kecil
   b. Sektor Perikanan dan Pelabuhan
      (a) Perikanan Laut, Tambak, Kolam, dan Sungai
      (b) Pelabuhan Tanjung Tembaga
   c. Sektor Perkebunan
      (a) Tanaman Mangga
      (b) Tanaman Anggur
2. Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Investasi di Daerah
   a. Sebagai Koordinator
      (a) Pengendalian dan Pengawasan terhadap Kegiatan PMDN dan PMA
   b. Sebagai Stimulator
      (a) Penyusunan Buku Profil Potensi Unggulan Kota Probolinggo
      (b) Promosi Potensi Daerah
   c. Sebagai Entrepreneur
      (a) Peningkatan Kinerja Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

d. Sebagai Fasilitator

(a) Penyelenggaraan Forum Investasi dan Temu Usaha

3. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di Kota Probolinggo

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat yang ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Probolinggo, karena Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk melaksanakan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi masih banyak yang belum tergarap secara optimal.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana sesungguhnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya berkaitan dengan obyek yang diteliti. Disini yang menjadi situs penelitian adalah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman No. 19 Probolinggo. Alasan dari pemilihan situs penelitian ini karena Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal merupakan Kantor Pemerintah Kota Probolinggo yang secara khusus menangani urusan rumah tangga Daerah di bidang penanaman modal.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data menunjukkan dari mana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Sedangkan menurut Arikunto (1998:114), yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian ini, sumber data yang utama adalah informan, yaitu orang yang bisa memberikan informasi yang diperlukan tersebut. Berkaitan dengan fokusnya, dalam penelitian ini sumber datanya adalah:

1. Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

2. Kepala masing-masing Seksi dan staf Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang berkompeten dalam bidangnya.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
4. Bapak Puguh selaku salah satu pemilik dari UKM Kota Probolinggo

Jenis data yang menunjang penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

   Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, sebagai data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau hasil observasi di lapangan.
2. Data Sekunder

   Yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan media massa, catatan pejabat resmi, karya tulis ilmiah, dokumen pribadi, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses menggali data di lapangan, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Interview* (Wawancara)

Yaitu merupakan komunikasi langsung antara peneliti sebagai interviewer dengan nara sumber atau orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek penelitian sebagai enterviewee. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba, yang dikutip oleh Moleong (2000:135) antara lain:

> Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverigikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Herrien Purnamawati, M.Si selaku Kepala Bagian Perekonomian dan

Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, Bapak Drs. Yuda Hartanto selaku Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Bapak Drh. H. Wirasmo, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, serta Bapak Puguh selaku salah satu pemilik dari UKM Kota Probolinggo.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan penggalian data yang data bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan definisi sejenis, yang diberikan Arikunto (1998:236), bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis juga telah mendapatkan dokumen berupa Buku Profil Daerah Kota Probolinggo tahun 2007, Buku Profil Investasi Kota Probolinggo, Perkembangan Investasi Non PMA/PMDN Kota Probolinggo dari Bulan Juni 2008 sampai dengan Bulan Desember 2008, serta Data Industri Perusahaan PMA/PMDN Kota Probolinggo.

3. *Observasi* (Pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap keadaan obyek yang diteliti dan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam pengertian psikologik, menurut Arikunto (1998:146), bahwa *observasi* atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan tentang potensi investasi apa saja yang terdapat di Kota Probolinggo, Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan investasi serta faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi investasi di Kota Probolinggo.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Arikunto (1998:151), yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, dimana dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai perencana, analis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai pengumpul data utama.
2. Pedoman wawancara (*interview guide)*

   Sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara agar dalam wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan lancar.
3. Alat Tulis (catatan)

   Yaitu untuk mencatat hasil-hasil penelitian, baik dari hasil wawancara maupun observasi.

G. Analisa Data

Sebagai langkah selanjutnya, data yang telah dikumpulkan, yang masih mentah dan berdiri sendiri-sendiri harus dianalisa untuk melakukan klasifikasi data dan untuk menghubungkan setiap data yang diperoleh dan kemudian diambil kesimpulan terhadap hasil data tersebut. Menurut Patton dalam Moleong (2000:103), yang dimaksud dengan analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Miles dan Huberman (1992:16-19), tahap-tahap analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

   Pada penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan alasan karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang ada di lapangan, yang mana dalam upaya memberi penjelasan tentang fenomena itu akan lebih banyak berupa kata-kata ataupun kalimat (data kualitatif) daripada data yang berupa angka-angka. Oleh karena itulah, maka pengolahan datanya menggunakan analisa data kualitatif.

H. Keabsahan Data

Agar penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Moleong (2000:173-180), mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Memperpanjang keikutsertaan di lapangan

   Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Melakukan pengamatan secara intensif

   Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Melakukan *peer debriefing*

   Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari rekan-rekan sejawat yang diperoleh melalui diskusi.

4. *Triangulasi*

   Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Menurut Moleong (2000:178), ada empat *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidik dan teori. Dalam penelitian ini teknik *triangulasi* yang digunakan dalam memanfatkan penggunaan sumber, metode dan teori.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a. Deskripsi Kota Probolinggo

1) Keadaan Kota Probolinggo

Secara geografis Kota Probolinggo berada di lingkungan strategis, yaitu merupakan Kota transit yang menghubungkan Kota Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang untuk disebelah Timur dan Kota Pasuruan, Malang dan Surabaya disebelah barat. Sebagai daerah Transit Kota Probolinggo dapat memberikan alternatif singgah bagi wisatawan baik asing maupun domestik yang bertujuan ke obyek-obyek wisata disekitar Wilayah Probolinggo seperti Gunung Bromo maupun arung jeram di Kabupaten Probolinggo. Selain itu Kota Probolinggo juga memiliki kekayaan diberbagai sektor antara lain Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri dan Pelabuhan. Peluang untuk mengembangkan potensi tersebut masih terbuka luas karena ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang cukup dengan tingkat pendidikan bervariasi, serta tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

2) Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Probolinggo terletak antara 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04” Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas wilayah 5.667,70Ha. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah barat Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah timur Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 56,667 Km^2, yang terbagi atas beberapa wilayah kecamatan, dan masing-masing kecamatan ada beberapa desa / kelurahan. Secara administratif Kota Probolinggo terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Masing-masing Desa / Kelurahan
tahun 2007

No.	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
1.	Kecamatan Mayangan	
	Mayangan	127.60
	Sukabumi	148.70
	Mangunharjo	345.50
	Jati	124.60
	Wiroborang	119.10
	Jumlah	865.50
2.	Kecamatan Kanigaran	
	Tisnonegaran	247.90
	Curahgrinting	126.90
	Kanigaran	342.70
	Kebonsari Kulon	155.80
	Kebonsari Wetan	97.60
	Sukoharjo	94.40
	Jumlah	1065.30
3.	Kecamatan Kademangan	
	Kademangan	213.00
	Pilang	306.80
	Ketapang	205.10
	Triwung Lor	207.70
	Triwung Kidul	176.30
	Pohsangit Kidul	166.50
	Jumlah	1275.40
4.	Kecamatan Wonoasih	
	Wonoasih	84.30
	Jrebeng Kidul	197.00
	Pakisaji	185.50
	Kedunggaleng	129.80
	Kedungasem	314.50
	Sumbertaman	187.00
	Jumlah	1098.10
5.	Kecamatan Kedupok	
	Sumber Wetan	487.60
	Kareng Lor	234.50
	Jrebeng Kulon	153.00
	Jrebeng Wetan	90.50
	Jrebeng Lor	286.60
	Kedupok	110.20
	Jumlah	1362.40
	Jumlah Total	5666.70

Sumber : Buku Profil Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007

Berdasarkan daftar tabel sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kedupok memilik luas wilayah yang terbesar jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Probolinggo yakni 1362.40 Ha, sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil dibandingkan dengan daerah lainnya yakni Kecamatan Mayangan dengan luas 865.50 Ha. Pada kecamatan Mayangan memiliki wilayah yang sempit dikarenakan sebagian besar dari lahannya adalah berupa pantai dan PPI (Pelabuhan Pelelangan Ikan) di Kota Probolinggo.

Secara Administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo berbatasan langsung dengan Selat Madura dan wilayah Kabupaten Probolinggo, dengan rincian pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Batas Wilayah Administrasi Kota Probolinggo tahun 2007

No.	Berbatasan	Wilayah
1.	Sebelah Utara	Selat Madura
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran, dan Kecamatan Sumberasih
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Sumberasih
4.	Sebelah Timur	Kecamatan Dringu

Sumber : Buku Profil Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jika dilihat dari batas-batas administrasi pemerintahan Kota Probolinggo adalah berbatasan langsung dengan Selat Madura dan beberapa wilayah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Probolinggo.

Menurut data yang diperoleh mengenai kondisi alam Kota Probolinggo mayoritas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan laut. Suhu udara di Kota Probolinggo maksimum 32^0C dan minimum 26^0C dengan rata-rata jumlah curah hujan tahun 2006 tercatat 1.409,50 mm dan hari hujan sebanyak 71 hari. Pada tahun 2006 musim penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai November. Pada musim kemarau biasanya terdapat angin dari arah tenggara ke barat laut yang populer disebut angin gending.

a. Topografi

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 (nol) meter sampai kurang lebih 50 m di atas permukaan air laut.

Ketinggian tersebut dapat dikelompokkan atas :

- Ketinggian : 0 – 10 meter
- Ketinggian : 10 – 25 meter
- Ketinggian : 25 – 50 meter

Ketinggian daratan Kota Probolinggo semakin ke wilayah selatan, semakin tinggi dan rata-rata ketinggian mencapai 4 meter. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo bertopografi datar dan landai dengan kemiringan antara 0 – 2%.

b. Iklim

Keadaan iklim di Kota Probolinggo merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober.

Curah hujan tertinggi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan-bulan lain curah hujan relatif rendah. Rata-rata curah hujan pada tahun 2004 dari hasil pemantauan 4 stasiun pengamat hujan tercatat sebanyak 1.106 mm dari hasil hujan tercatat 62 hari mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2003 curah hujan sebanyak 918 mm dan hari hujan sebanyak 59 hari. Suhu udara tertinggi 32^0C dengan kelembaban udara berkisar 85%.

Selain itu pada bulan Juli sampai dengan September di Kota Probolinggo terdapat angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km per jam) dari arah tenggara ke barat laut, angin ini popular dengan sebutan/nama angin gending.

c. Geologi dan Jenis Tanah

Keadaan geologi wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan jaman kuarter muda (Young Quarter Vulcanic Product) dengan luas 3.766,8 ha atau 66,47% yang terdapat pada bagian tengah dan selatan di wilayah kota serta dibentuk dari bahan endapan (alluvium) dengan luas 1.899,9

ha atau sebesar 33,53% yang berada pada bagian utara wilayah kota dan sebagian kecil ditenggara (Desa Kedungasem).

Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari alluvial hidromov seluas 466,875 ha atau 8,24% terletak disepanjang pantai/lautan mangrove. Alluviral kelabu tua 1.600,050 ha atau 28,24% alluvial kecoklat kelabuan 3.314,025 ha atau 58,48% dan regosol coklat 73,25 ha atau 1,29% (terletak dikelurahan Sukoharjo 30,150 ha dan sumber taman 40,975 ha) serta jenis tanah komplek grumosol hitam dan litosol seluas 212,625 ha atau 3,75% yang terletak di ujung selatan wilayah kota (Kelurahan Sumber Wetan dan Kareng Lor). Jenis tanah alluvial (jenis tanah terluas) merupakan tanah yang sangat baik untuk pengembangan pertanian, karena tersedia cukup mineral yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan, dan jika digunakan untuk bangunan, tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus. Secara umum kondisi dan struktur tanah di Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman perkebunan khususnya mangga yang merupakan komoditi unggulan.

d. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan yang ada di suatu daerah adalah merupakan suatu ruangan hasil gabungan aktivitas manusia sesuai dengan tingkat teknologi, jenis usaha, kondisi fisik, jumlah penduduk, serta ketersediaan lahan yang ada disuatu wilayah.

Kota Probolinggo dengan luas 5.667 Ha terdiri dari Lahan Sawah 1.967,70 Ha (34,72%), dan Lahan Bukan Sawah 3.669 Ha (65,28%). Lahan Bukan Sawah terbagi atas Lahan Kering 3.595 Ha (97,19%) dan Lahan Lainnya (Tambak) 104 Ha (2,81%). Kemudian Lahan Kering terdiri dari Pekarangan 2.178,65 Ha (60,60%), Tegal/Kebun 761,37 Ha (21,18%) dan lain-lain lahan Kering 654,98 Ha (18,22%) dirinci pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Luas Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2006

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2006 (Ha)	%
I	Lahan Sawah	1.967,70	34,72
1	Irigasi Teknis	1.967,70	34,72
II	Lahan Bukan Sawah	3.699,00	65,28
A	Lahan Kering	3.595,00	97,19
1	Pekarangan	2.178,65	60,60
2	Tegal/Kebun	761,37	21,18
3	Lain-lain	654,98	18,22
B	Lahan Lainnya	104,00	2,81
1	Rawa-rawa	0	
2	Tambak	104,00	2,81
	JUMLAH	5.666,70	100

Sumber : Buku Profil Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007

Kondisi alam Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan air laut. Kota Probolinggo dilalui oleh 6 (enam) sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Sungai Umbul, Sungai Banger, Sungai Legundi, Sungai Kasbah dan Sungai pancur. Suhu udara di Kota Probolinggo maksimum 32^0C dan minimun 26^0C. Dilihat dari jenis penggunaan lahan 34,72% (1.967,70 Ha) lahan di Kota Probolinggo merupakan lahan sawah dan sisanya 65,28% (3.699 Ha) berupa lahan bukan sawah.

Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam di Kota Probolinggo untuk penggunaan tertentu memerlukan perencanaan yang cermat guna memperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan isu global guna menjaga kelestarian alam demi masa depan generasi berikutnya.

3) Kondisi Demografi (Penduduk)

Penduduk Kota Probolinggo berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2007 berjumlah 186.773 jiwa, yang terdiri atas 91.430 jiwa laki-laki dan 95.343 jiwa perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu selisih 3.913 jiwa dengan sex ratio 95,90%. Untuk

mengetahui lebih jelas mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan, akan ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan tahun 2007

No.	Kecamatan	Kepala Keluarga (buah)	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Kademangan	8.232	15.497	15.879	31.376
2.	Wonoasih	6.630	12.156	12.202	24.358
3.	Mayangan	12.725	28.100	29.852	57.952
4.	Kanigaran	10.465	23.666	25.334	49.000
5.	Kedupok	6.277	12.031	12.076	24.107
	Jumlah	44.420	91.450	95.343	186.793

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2007

Dilihat dari perbandingan penduduk antar kecamatan, penduduk kecamatan Mayangan merupakan wilayah yang paling banyak jumlah penduduknya yakni sebesar 57.952 jiwa, kemudian kecamatan Kanigaran sebesar 49.000 jiwa, kecamatan Kademangan sebesar 31.376 jiwa, kecamatan Wonoasih sebesar 24.358 jiwa, dan yang terakhir kecamatan Kedupok sebesar 24.107 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Probolinggo menurut data mata pencahariannya dapat dibagi menjadi enam, yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, ABRI, petani, pedagang, buruh tani, nelayan dan lain-lainnya. Dilihat dari proporsinya, pekerjaan yang masuk kelompok lainnya adalah cukup besar, namun sayangnya tidak ada kejelasan apa yang dimaksud dengan lainnya. Apakah ”lainnya” dapat diartikan masuk pekerjaan informal (tukang becak, kuli bangunan, kerja serabutan/tukang rombeng). Ketidakjelasan ini dapat mengurang ketepatan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah penduduk akhir tahun menurut data mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Data Mata Pencaharian
Tahun 2006 / 2007

N0.	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH (orang)
1.	Pegawai Negeri/ABRI/Swasta	27.405
2.	Petani	8.113
3.	Pedagang	11.604
4.	Nelayan	3.513
5.	Buruh Tani	19.117
6.	Lainnya	83.530
	Jumlah	153.282

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2006/2007

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang mata pencahariannya paling besar adalah dari pegawai negeri, swasta, dan ABRI kemudian mata pencaharian lain-lain yaitu petani, pedagang, nelayan, dan buruh tani. Besarnya konsentrasi penduduk diluar lapangan pekerjaan tersebut diatas menumbuhkan tekad Pemerintah Kota Probolinggo untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota Tujuan Investasi.

4) Keadaan Sosial Budaya

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Probolinggo telah mengalami perkembangan dari pola budaya yang agraris (petani dan nelayan) menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan dari spektrum kesukuan, komposisi sosial masyarakat Kota Probolinggo secara keseluruhan didominasi oleh suku Jawa dan Madura yang memiliki karakteristik utama ulet, tegas, terbuka dan lugas dalam mengekspresikan pikiran dan keinginan mereka. Penduduk Kota Probolinggo lainnya terdiri berbagai etnis minoritas Tionghoa, Arab, Melayu, dan berbagai suku pendatang lainnya yang berdiam di Kecamatan di Kota Probolinggo.

Corak adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Kota Probolinggo merupakan perpaduan diantara kedua budaya tersebut. Kehidupan merekapun relatif rukun dan damai. Hal ini merupakan landasan yang potensial bagi persatuan bangsa yang perlu dipelihara dan dikembangkan serta ditingkatkan. Secara esensial orang Jawa menganggap dirinya duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan orang lain sedangkan kelebihan seorang pemimpin hanya karena

ditinggikan selangkah. Sama halnya dengan yang diungkapkan pada sistem adat istiadat masyarakat Kota Probolinggo, perubahan sosial tidak dapat dielakkan ditengah masyarakat yang selalu dinamis. Nilai sosial yang melekat pada masyarakat Kota Probolinggo tidak berbeda dengan nilai sosial ideal Jawa pada umumnya, dimana rasa kolektifitas menjadi sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Individu tidak bisa dengan leluasa berbuat tanpa ada kesepakatan kolektif dalam mencapai tujuan hidupnya. Mereka tetap terikat dengan sebuah kesadaran kolektif. Jumlah kesenian di Kota Probolinggo terdiri dari 15 kesenian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Jumlah organisasi kesenian menurut jenisnya dan kecamatan
Tahun 2007

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Kesenian (buah)	Jumlah Anggota (orang)
1.	Ludruk	2	45
2.	Sanggar seni	5	100
3.	Jaran bodak	5	64
4.	Bina tari	3	40
5.	Lengger	1	9
6.	Orkes melayu	20	210
7.	Orkes keroncong	2	24
8.	Band	5	50
9.	Samroh	7	60
10.	Kosidah	2	30
11.	Hadrah	3	40
12.	Karawitan	5	60
13.	Campursari	4	40
14.	Fashion show	2	30
15.	Orkes gambus	1	15
	Jumlah	67	817

Sumber : Kota Probolinggo dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis kesenian yang terdapat di Kota Probolinggo, yang memiliki jumlah terbanyak adalah kesenian Orkes Melayu sebanyak 20 kelompok dengan jumlah anggotanya 210 orang yang lebih memperoleh anggota dibandingkan jenis kesenian lainnya.

5) Keagamaan (Prasarana Ibadah)

Agama merupakan landasan spiritual dan mempunyai peran yang sangat mendasar dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Karena itu pembangunan agama perlu mendapat perhatian yang besar dimasa datang terutama dalam menghadapi era globalisasi dengan berbagai dampak negatif yang mungkin timbul yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Masyarakat Kota Probolinggo mayoritas beragama Islam, sarana ibadah yang terdapat di Kota Probolinggo berupa 118 masjid, 850 mushola / langgar. Dilihat dari persebaran sarana ibadah di Kota Probolinggo sudah cukup baik, dimana telah terdapat pemerataan di setiap kecamatan dan kelurahan. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam aspek ibadah ini adalah bagaimana nilai-nilai agama dapat diimplementasikan dan terakhir dalam bentuk akhlaq yang luhur yang jauh dari berbagai penyakit masyarakat dan penyimpangan perilaku lainnya. Adapun perincian jumlah tempat ibadah di masing-masing kelurahan dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Jumlah Sarana Ibadah di Kota Probolinggo Tahun 2006

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Tempat Ibadah					
		Masjid (buah)	Musholla (buah)	Gereja Katolik (buah)	Gereja Protestan (buah)	Vihara (buah)	Pura (buah)
I.	Mayangan	33	206	1	13	1	-
II.	Kademangan	29	243	-	-	-	-
III.	Wonoasih	58	401	-	-	-	-
	Jumlah	118	850	1	13	1	-

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka 2005/2006

6) Perekonomian

Dalam konteks sumber daya alam (SDA) yang terdapat di Kota Probolinggo sangat terbatas sekali. Pertanian merupakan komoditi andalan di Kota Probolinggo, antara lain yaitu tanaman bahan makanan, tanaman sayuran, tanaman buah dan tanaman perkebunan. Komoditi tanaman bahan makanan untuk luas total panen yaitu 6.774 Ha, serta Produksi total yaitu 2.9693,3 ton. Komoditi tanaman sayur dan komoditi buah yaitu 108.024 pohon, serta Produksi total yaitu 7.443,78 ton. Dan komoditi tanaman perkebunan luas total panen yaitu 280,97 Ha, serta Produksi total yaitu 1.707.917 ton. Sedangkan yang termasuk tiga komoditi

pertanian utama di Kota Probolinggo adalah berasal dari hasil Anggur, hasil Mangga dan dari hasil tebu yang sangat melimpah dari tahun ke tahun.

Dilihat dari sektor industri, sebagian besar industri di Kota Probolinggo bersentuhan langsung dengan industri kecil dan rumah tangga. Menurut data dari DEPKOPINDAG, tenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan sebanyak 10.075 orang terbagi di industri besar sebanyak 8.578 orang (85,14%) dan sisanya 1.497 orang industri kecil. Jumlah tenaga kerja terbanyak terdapat pada industri garment dan plywood. Sedangkan jumlah tenaga kerja di industri kecil terbanyak terdapat pada industri bordir, roti dan mebel.

b. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Probolinggo

1) Visi dan Misi

Visi yang akan menjadi arah dalam pelaksanaan tugas yakni ”Menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi para penanam modal atau investor dan calon investor di wilayah Kota Probolinggo guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo”.

Makna dari pernyataan visi tersebut, yaitu bahwa dengan iklim yang kondusif, maka akan berpengaruh pada penciptaan kondisi keamanan, politik dan ekonomi yang stabil dan hal ini akan mendukung masuknya investor luar negeri maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Probolinggo, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Konsentrasi dari harapan dan tujuan akan visi ini sinkron dan seirama dengan visi Kota Probolinggo, yaitu “Terwujudnya Kota Probolinggo Sebagai Tujuan Investasi yang Prospektif, Kondusif, dan Partisipatif’’ terutama bagian dalam hal Kondusif.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya perwujudannya melalui misi :

a. Menyediakan data dan informasi berupa Buku Profil Potensi Kota Probolinggo.
b. Memberikan kemudahan di bidang perijinan serta peluang berusaha seluas-luasnya bagi investor baik dalam maupun luar negeri.

c. Meningkatkan promosi potensi unggulan Kota Probolinggo melalui kegiatan pameran dan forum investasi (temu usaha) baik di dalam maupun di luar negeri.
d. Meningkatkan kualitas SDM personil Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal melalui Diklat, Seminar, Workshop, Magang dan Lokakarya.
e. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal.

Melalui visi dan misi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Probolinggo diatas serta banyak hal dan harapan yang perlu kita raih kedepan dengan komitmen dan langkah-langkah kebersamaan menjadi pedoman dalam rangka menuju kesuksesan di masa mendatang.

2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. Memberikan informasi berupa potensi Kota Probolinggo kepada investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri secara tepat dan akurat.
b. Memberikan kemudahan dalam birokrasi di bidang investasi dan penanaman modal.
c. Memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
d. Memberikan kesempatan kepada setiap personil Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang investasi dan penanaman modal.
e. Menjalin hubungan yang kondusif dengan PMA dan PMDN yang ada di Kota Probolinggo.

Sedangkan yang menjadi sasaran adalah :

a. Tercapainya jumlah investasi pada setiap potensi unggulan di Kota Probolinggo.
b. Terwujudnya sistem pelayanan birokrasi yang optimal bagi investor.
c. Terciptanya peluang investasi di seluruh bidang usaha.

d. Terciptanya kualitas Sumber Daya Aparatur di bidang investasi dan penanaman modal.
e. Terciptanya hubungan yang kondusif antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan PMA dan PMDN sehingga terbina/terjaga suasana yang sehat, nyaman dan aman dalam berusaha serta dapat mengembangkan nilai investasi.

3) Arah Kebijakan dan Program

Berdasarkan Perencanaan Strategis Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo, disebutkan bahwa :

a. Arah kebijakan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah mengupayakan terlaksananya prosedur perijinan penanaman modal yang sederhana, mudah, cepat dan aman, serta peningkatan pelayanan dengan menyediakan data/profil potensi peluang investasi yang dapat digunakan sebagai informasi tentang peluang berusaha.
b. Program Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah pelaksanaan promosi potensi daerah dan penyediaan prosedur perijinan penanaman modal yang sederhana, cepat, mudah dan aman.

4) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo

Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah :

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Penanaman Modal.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal.
b. Penyusunan skala prioritas, strategi penanaman modal dan investasi lainnya.
c. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi.
d. Pelaksanaan kerjasama dengan investor dari luar maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya.
e. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi.
f. Pemberian fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

2. Data Fokus Penelitian

a. Potensi Investasi yang Terdapat di Kota Probolinggo

Probolinggo memiliki kekayaan di berbagai sektor antara lain sektor Industri, Perdagangan, Perikanan, Pelabuhan, serta Perkebunan. Peluang untuk mengembangkan potensi masih terbuka luas karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang cukup dengan tingkat pendidikan bervariasi, serta tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Disamping itu letak geografis Probolinggo cukup strategis yaitu merupakan Kota Transit yang menghubungkan kota-kota Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Jember yang berada disebelah timur dan kota-kota Pasuruan, Malang dan Surabaya yang berada disebelah Barat Kota Probolinggo. Dengan demikian Kota Probolinggo menjadi Kota Transit untuk lalu lintas perekonomian di Jawa Timur khususnya Kota Probolinggo dalam memasarkan hasil-hasil produksinya baik dipasar domestik maupun pasar global.

Untuk mengetahui potensi ekonomi Kota Probolinggo setidaknya dapat dilihat dari perkembangan beberapa bidang ekonomi sebagai berikut : Bidang Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Perikanan, Bidang Pelabuhan, dan Bidang

Perkebunan. Perkembangan bidang-bidang ekonomi ini disamping sebagai indikasi produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, juga sebagai gambaran dari situasi dan kondisi serta prospek dalam melakukan kegiatan usaha.

1) Sektor Industri dan Perdagangan

Kota Probolinggo merupakan daerah yang mempunyai perkembangan industri dan perdagangan yang sangat besar. Hal ini karena letaknya sebagai Kota Transit yang menghubungkan kota-kota besar lainnya serta sarana penunjang yang sangat mendukung seperti perbankan dan sarana transportasi darat maupun laut. Sektor industri harus mampu memainkan perannya di Kota Probolinggo terutama yang bersentuhan langsung dengan industri kecil dan rumah tangga. Dilihat dari segi kuantitas jumlah industri baik industri besar maupun industri kecil, jumlah industri besar di Kota Probolinggo sebanyak 19 buah dan industri kecil sebanyak 124 buah. Jenis industri besar dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8
Industri Besar di Kota Probolinggo
Tahun 2007

No	Jenis Industri	Jumlah (buah)
1.	Kecap	1
2.	Kulit	1
3.	Es Batu	3
4.	Kapur Tulis	1
5.	Formalin / Adhesif	1
6.	Garment	1
7.	Pertenunan	1
8.	Keramik	1
9.	Plywood	1
10.	Pengolahan Kayu	1
11.	Antena Parabola	1
12.	Perawatan dan Perbaikan Kapal	1
13.	Phenol Resin	1
14.	Pengolahan Ikan	1
15.	Air Minum dalam kemasan	2
16.	Eternit	1
	Jumlah Total	19

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis industi besar yang terdapat di Kota Probolinggo, yang memiliki jumlah terbanyak adalah

Industri Es Batu sebanyak 3 buah yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis industri besar lainnya. Sedangkan untuk jenis industri kecap, kulit, kapur tulis, formalin, garment, pertenunan, keramik, plywood, pengolahan kayu, antena parabola, perawatan dan perbaikan kapal, phenol resin, pengolahan ikan dan eternit masing-masing terdapat hanya 1 buah industri saja. Jumlah perusahaan industri besar pada tahun 2004 sampai tahun 2007, yakni tetap 19 perusahaan. Dan berikut ini merupakan data tentang jenis industri kecil dilihat berdasarkan jumlah industri dan tenaga kerjanya pada tabel 9.

Tabel 9
Industri Kecil di Kota Probolinggo
Tahun 2007

No	Jenis Industri	Jumlah (buah)	Tenaga Kerja (orang)
1.	Es Cream	1	3
2.	Mie	3	35
3.	Kembang Gula	2	16
4.	Kecap	1	5
5.	Tahu	8	57
6.	Kopi Bubuk	6	77
7.	Krupuk	1	10
8.	Kacang Telor	5	48
9.	Limun	3	33
10.	Sirop	2	13
11.	Bordir	5	238
12.	Penggergajian Kayu	1	3
13.	Percetakan	9	50
14.	Sabun Cuci	2	4
15.	Kantong Plastik	2	35
16.	Gambir	1	3
17.	Tegel	1	7
18.	Sanitair	6	73
19.	Keramik	1	19
20.	Pertukangan Emas	4	15
21.	Tepung Hunkwe	2	15
22.	Konveksi Pakaian	9	96
23.	Air Accu	3	5
24.	Penggilingan Batu Merah	1	3
25.	Roti	8	106
26.	Peti Kemas Dari Kayu	1	12
27.	Pengawetan Kulit	3	17
28.	Sedlak	20	265
29.	Ikat Pinggang Kulit	1	10
30.	Krupuk Ikan	1	6
31.	Pagar Teralis	5	33

32.	Makanan Lainnya	1	8
33.	Minuman Ringan	1	5
34.	Rokok	2	70
35.	Gigi Palsu	1	5
36.	Toples Plastik	1	3
	Jumlah	124	1.403

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi pada industri kecil adalah jenis industri sedlak dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 265 orang dengan jumlah industri sebanyak 20 buah. Sedangkan industri kecil yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah jenis industri es cream, penggergajian kayu, gambir, penggilingan batu merah dan toples plastik dengan menyerap tenaga kerja masing-masing sebanyak 3 orang dengan jumlah industri masing-masing sebanyak 1 buah. Berikut merupakan contoh industri kecil bidang bordir di Kota Probolinggo, dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 2
Industri Kecil Bordir

Sumber : Pengamatan di lapangan

Pengembangan usaha industri diupayakan agar pengrajin mampu mengelola usahanya sehingga produk yang dihasilkan selain dapat dipasarkan juga mempunyai prospek untuk dikembangkan. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan pemilik industri kecil bordir yang berada di Jalan Lumajang, yang mengatakan bahwa :

"…..kita selaku pelaku usaha industri diberikan pengertian dan pengarahan melalui pembinaan-pembinaan agar membuat atau menghasilkan produk-produk yang laku dijual dan tidak membuat atau menghasilkan produk yang tidak diminati di pasaran sehingga industri dapat berkembang semaksimal mungkin."
(Hasil wawancara dengan Ibu Ita, tanggal 5 Februari 2009, di ruang kerjanya)

Sektor industri harus mampu memainkan perannya di Kota Probolinggo terutama yang bersentuhan langsung dengan industri kecil dan rumah tangga. Dilihat dari segi kuantitas jumlah industri baik industri besar maupun industri kecil. Jumlah industri besar di Kota Probolinggo sebanyak 19 buah dan industri kecil sebanyak 124 buah. Kuantitas perusahaan industri kecil juga bertambah dari 121 perusahaan pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 124 perusahaan pada tahun 2004. Berikut ini pada tabel 10 digambarkan perkembangan Industri di Kota Probolinggo.

Tabel 10
Kondisi Industri Kecil dan Menengah di Kota Probolinggo
Tahun 2003-2006

No.	Jenis Industri	Tahun			
		2003	2004	2005	2006
1.	Industri Besar (buah)	19	19	19	19
	- Tenaga Kerja (orang)	8.255	8.292	8.292	8.578
2.	Industri Kecil (buah)	121	124	124	124
	- Tenaga Kerja (orang)	1.371	1.403	1.403	1.497

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2007

Setiap tahunnya industri besar tidak mengalami peningkatan jumlah industri akan tetapi jumlah tenaga kerjanya semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat membuktikan bahwa setiap tahunnya industri besar dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari 8.578 orang yang bekerja di industri besar, sebanyak 41,16% terserap di industri garment dan sebanyak 30,70% terserap di industri plywood. Hal yang menarik adalah karakteristik jenis kelamin pekerjaan di kedua industri ini, kalau industri garment menyerap pekerja perempuan sebanyak 76,50% dari total pekerja, sedangkan di industri plywood

pekerja laki-laki mendominasi sebanyak 79,38% terhadap total pekerja. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada industri besar meskipun jenis industrinya tidak mengalami kenaikan tetapi mereka berkembang dengan menambah jumlah tenaga kerjanya. Demikian juga dengan tenaga kerja yang diserap oleh industri kecil, setiap tahunnya mengalami kenaikan dan hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Probolinggo.

Dalam era globalisasi ini, terutama untuk menghadapi era perdagangan bebas, Kota Probolinggo berupaya untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif untuk meningkatkan investasi, baik berupa PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Di Kota Probolinggo sudah berdiri beberapa 22 Perusahaan Industri yaitu berupa 6 PMA dan 16 PMDN dan data proyek perusahaan PMA dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11
Data Proyek Perusahaan PMA Kota Probolinggo
Tahun 2008

No	Nama Perusahaan	Komoditi Utama	Nilai Investasi	Tenaga Kerja (orang)
1.	PT. Kutai Timber Indonesia	- Plywood - Second Process - L Core/Join Boat - Wood WDR / Moilding - Scraft Moilding - LVB LVX - Particle Board (perluasan)	Rp.15.000.000.000 ,00	2.644
2.	PT. Eratex Djaya	- Benang - Kain - Garment	Rp. 4.100.000.000,00	241
3.	PT. Aneka Food Tata Rasa	- Kecap - Kripik Buah - Saos Tomat		*)
4.	PT. Indopherin Jaya	- Resin Phenol	Rp. 15.084.000.000,00	99
5.	PT. Pamolite	- Urea/Phenola		139

	Adhesive Indonesia	- Formalin	Rp. 62.956.168.100,00	
6.	PT. Schroom Indonesia	- Surimi (Ikan Cacah Beku)	US $ 1.400.000	*)
			Rp. 4.100.000.000,00	

*) Belum menyampaikan nilai investasi pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota probolinggo

Sumber : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo tahun 2008

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa perusahaan industri yang berupa PMA, PT Kutai Timber Indonesia yang tertinggi dalam menarik tenaga kerja dibanding dengan perusahaan lainnya yaitu sebanyak 2.644 orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 15.000.000.000,00. Sedangkan data proyek perusahaan PMDN dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 12
Data Proyek Perusahaan PMDN Kota Probolinggo
Tahun 2008

No.	Nama Perusahaan	Komoditi Utama	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (orang)
1	PT. Rimba Sempana Industri (RSI)	- Finger Join - LMTD Board - Sys - Sys Floring	500.000.000	*)
2.	PT. Sumber Taman Kramika	- Guci Air, Teh Pot, Rooster, Art Ware, Tempat Sabun	1.964.978.679	440
3.	Industri	Crusty Finish,	3.621.172.665	142
4.	CV. Sumber Setia	Lesther Es Batu	500.000.000	*)
5.	PT. Sukses Lautan Indonesia	Ikan Beku Es Batu	650.000.000	*)
6.	PT. Air Mas Lestari Jaya	Kapur Tulis	300.000.000	*)
7.	Sentosa		105.048.000	*)
8.	PT. Sumber	Es Batu	1.269.000.000	*)

9.	Taman Kramika Industri	AMDK	2.625.000.000	6
10.	PT. Es Arjuno PT. Lingga Mas / OSMO PT. Utama Tirta Lestari	AMDK - Asbes Gelombang - Eternit - Paving Stone	3.600.000.000	175
11.	PT. Amak	- Genteng Beton	35.000.000	*)
12.	Firdaus Utama	Mebel Antik Perabot Rumah	469.260.000	*)
13.		Tangga dari Porcelen	15.000.000	*)
14.	UD. Jodang	Minuman Ringan	6.825.000.000	*)
15.	PT. Paolo II	Bordir	60.000.000	*)
16.	"SHAKAS" UD. Rizza Bordir Keramik Jawa PD. Sejera Swajaya	Keramik Bordir	40.000.000	*)

*) Belum menyampaikan nilai investasi pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota probolinggo

Sumber : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo tahun 2008

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa perusahaan industri yang berupa PMDN, UD. Rizza Bordir yang tertinggi nilai investasinya yaitu sebesar Rp. 6.825.000.000,00 dan yang terendah nilai investasinya adalah "SHAKAS" yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00.

Perdagangan

Posisi Kota Probolinggo dinilai sangat strategis karena dilalui jalur lalu lintas yang menghubungkan kota-kota antara lain sebelah barat Kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Malang sedangkan sebelah timur

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo sehingga sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan. Lalu lintas angkutan jalan raya yang ramai baik di waktu siang maupun malam hari merupakan keunggulan komparatif dalam meningkatkan perputaran uang dalam transaksi perdagangan.

Untuk memacu pertumbuhan sektor perdagangan dimasa yang akan datang, perkembangan pasar perlu diarahkan kepada pasar modern dengan tidak mengesampingkan pasar tradisional yang sudah ada. Karena investasi perlu dibuka lebar dan jalinan kerjasama dengan para investor harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, kebijakan ini yang ditempuh Pemerintah Kota Probolinggo. Perkembangan jumlah pedagang pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 9,72% dari 3.044 pedagang dari tahun 2005 menjadi 3.340 pedagang pada tahun 2006. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13
Perkembangan Perusahaan Perdagangan di Kota Probolingggo
Tahun 2003-2006

Jumlah Perusahaan	2003	2004	2005	2006
Perusahaan Besar (buah)	42	49	52	58
Perusahaan Menengah (buah)	471	486	497	530
Perusahaan Kecil (buah)	2.160	2.340	2.495	2.752
Jumlah (buah)	2.673	2.875	3.044	3.340

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2007

Pedagang dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu pedagang Kecil sebanyak 2.752 pedagang (82,39%), Pedagang Menengah sebanyak 530 pedagang (15,87%) dan Pedagang Besar sebanyak 58 pedagang (1,74%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pedagang kecil pada tahun 2006 meningkat sebesar 10,30%, pedagang menengah meningkat sebesar 6,64%, dan pedagang besar meningkat sebesar 11,54%. Perkembangan investasi di bidang usaha perdagangan mengalami penurunan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14

Perkembangan Investasi Bidang Perdagangan Kota Probolinggo
Tahun 2008

No.	Bulan	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (orang)	Sumber Data
1.	Juni	67	9.001.715.999	191	SIUP
2.	Juli	48	16.938.331.550	116	SIUP
3.	Agustus	35	4.552.237.248	70	SIUP
4.	September	32	3.610.000.000	64	SIUP
5.	Oktober	30	2.912.050.000	60	SIUP
6.	November	7	3.167.000.000	44	SIUP
7.	Desember	32	3.850.000	64	SIUP

Sumber : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2008

Dari data perkembangan investasi di bidang perdagangan diatas dapat memberikan gambaran bahwa dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2008 investasi di bidang perdagangan mengalami penurunan dalam hal unit usaha yaitu dari 67 turun menjadi 48, dan dalam hal tenaga kerja yaitu dari 191 turun menjadi 116 akan tetapi mengalami peningkatan dalam hal investasi yaitu dari Rp. 9.001.715.999,00 menjadi Rp. 16.938.331.550,00.

2) Sektor Perikanan dan Pelabuhan

Salah satu potensi besar yang dimiliki Kota Probolinggo adalah potensi perikanan karena hasil dari produk perikanan sesungguhnya mampu dipergunakan menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran. Ini akan menjadi modal besar untuk mengembangkan kreatifitas dalam menentukan arah pembangunan. Target besar bisa dibangun dari sini di bidang perikanan.

Probolinggo secara geografis terletak di wilayah pesisir dengan panjang pantai ± 7 km. Oleh karena itu pula secara struktur masyarakatnya akan menggantungkan pada bidang perikanan. Implikasinya adalah bahwa diharapkan masyarakatnya akan lebih mudah untuk dikembangkan untuk menerima berbagai teknologi bidang perikanan. Beberapa kelurahan yang berada pada kawasan pesisir antara lain Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Pilang dan Kelurahan Ketapang.

Secara fisik keberadaan Pelabuhan Niaga Tanjung Tembaga adalah salah satu simbol potensi perikanan kita. Puluhan tahun pelabuhan itu merupakan salah satu sarana utama bagi pendaratan produksi perikanan tangkap di wilayah Kota Probolinggo. Beberapa aktifitas perekonomian dilakukan di pelabuhan tersebut antara lain perhubungan laut, industri kelautan, pendaratan ikan, perdagangan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Aktifitas perhubungan laut antara lain pengangkutan barang dan angkutan penumpang. Aktifitas industri kelautan antara lain terdapat galangan kapal meski dalam skala yang tidak terlalu besar namun cukup membantu dalam mengatasi permasalahan perkapalan di Kota Probolinggo. Aktifitas pendaratan ikan dilakukan oleh kapal-kapal perikanan baik yang dimiliki oleh nelayan lokal maupun dari luar Probolinggo. Dari ukuran yang paling kecil hingga ukuran di atas 30 GT. Aktifitas perdagangan ikan dapat kita lihat dari keberadaan pasar ikan tradisional yang terdapat pada sisi barat Pelabuhan Niaga Tanjung Tembaga. Sedangkan aktifitas pengolahan ikan diwakili dengan keberadaan perusahaan pengolahan ikan berupa fillet ikan oleh PT. Sulindo.

Sebagai daerah pesisir, potensi budidaya air payau atau tambak juga merupakan salah satu yang amat potensial untuk dikembangkan. Di wilayah pesisir Kota Probolinggo terdapat tambak ± 164,5 m2. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain bandeng dan udang. Namun demikian sebagian besar tambak tersebut masih dikelola secara tradisional. Jumlah pembudidaya ikan di Kota Probolinggo yang tercatat pada tahun 2007 adalah 94 orang dan 2 pembudidayaan dikelola oleh pemerintah. Dengan kondisi tersebut pengembangan kebijakan bidang perikanan budidaya diarahkan pada intensifikasi luasan tambak yang ada.

Hal lain yang merupakan potensi adalah kebutuhan pasar akan ikan air tawar. Pada sisi yang lain pembudidayaan ikan air tawar di kolam masih amat memungkinkan untuk dikembangkan mengingat luas wilayah dan kondisi perairan yang juga mendukung. Kota Probolinggo memiliki perairan umum berupa ranu dan sungai. Tinggal bagaimana pengelolaan perairan umum itu dilakukan. Melimpahnya produk perikanan berimbas pada potensi produk olahan ikan. Beberapa produk olahan telah berproses untuk menjadi produk khas dari Kota

Probolinggo. Produk olahan tersebut antara lain kerupuk ikan Jenggelek dan rambak ikan punti.

Terdapat 4 (empat) jenis produksi perikanan di Kota Probolinggo yaitu perikanan laut, perikanan tambak, perikanan kolam dan perikanan sungai. Untuk mengoptimalkan kegiatan usaha budidaya perikanan yang mempunyai keterbatasan sumber daya alam telah dilakukan kegiatan peningkatan produktivitas bagi usaha budidaya yang ada. Selanjutnya perkembangan produksi ikan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15
Perkembangan produksi Perikanan di Kota Probolinggo
Tahun 2006

No.	Uraian	Produksi 2005 (Kg)	Produksi 2006 (Kg)	Perkembangan (%)
1.	Perikanan laut	52.385.600	52.078.600	-0,59
2.	Perikanan tambak	324.100	276.300	-14,75
3.	Perikanan kolam	338.500	335.300	-0,95
4.	Perikanan sungai	75.400	35.700	-52,65

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2007

Produksi perikanan laut pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 14,26% dari 26.236.100 kg pada tahun 2003 menjadi 29.978.600 kg pada tahun 2004. Produksi total perikanan darat naik sebesar 19,85% dari 508.400 kg pada tahun 2003 menjadi 609.300 kg pada tahun 2004. Kenaikan volume ini dipicu oleh kenaikan yang sangat tajam pada volume produksi perikanan darat kolam sebesar 25,92%, perikanan darat sungai sebesar 122,40% dan perikanan darat tambak naik sebesar 2,74%. Pada tahun 2006 produksi perikanan kolam menurun sebesar -0,95% dan laut mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar -0,59% sedangkan produksi perikanan tambak dan sungai juga mengalami penurunan masing-masing sebesar -14,75% dan -52,65%.

Untuk bidang perikanan perkembangan lainnya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mayangan Kota Probolinggo terletak pada 500 meter ke arah timur dari pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo PPI yang luasnya 10 ha telah direncanakan sejak tahun

1990, namun baru dapat terlaksana dikerjakan mulai tahun 2003. Pembangunan PPI dimaksudkan antara lain untuk memperbaiki tata niaga ikan dan kesejahteraan nelayan melalui tempat pelelangan ikan, memberikan peluang kerja, mengkonsumsi kegiatan perikanan, memperbaiki kualitas ikan agar aman untuk dikonsumsi utamanya ikan ekspor serta menunjang pendapatan *income* daerah. Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, yang mengatakan bahwa :

”.....operasionalisasi PPI diharapkan akan memperpendek rantai pemasaran dari nelayan kepada konsumen. Dengan begitu diharapkan akan dapat diperoleh dua sisi positif sekaligus. Dampak positif dimaksud adalah bagi nelayan diharapkan akan terjadi peningkatan harga. Sedangkan bagi konsumen adalah konsumen akan memperoleh ikan dan produksi perikanan lainnya dengan mutu yang lebih bagus. Keberadaan PPI diharapkan dapat memberikan peluang meningkatnya investasi industri pengalengan ikan, *cool stroge*, pabrik es, doking kapal serta investasi bahari seperti pemancingan, taman rekreasi pantai dan jasa melihat ikan hias.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Drh. H. Wirasmo, M.Si, tanggal 18 Februari 2009, di ruang kerjanya)

Dengan paparan diatas dapat dikatakan bahwa operasional PPI di Pangkalan Pendaratan Ikan Mayangan merupakan data hasil pembangunan bidang perikanan khususnya prasarana penangkapan ikan. Tujuan dari pembangunan PPI ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat hanya saja untuk pengelolaannya lebih cenderung diarahkan kepada pihak investor untuk mengelolanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Sumber : Pengamatan di lapangan

Pelabuhan Tanjung Tembaga

Pelabuhan Tanjung Tembaga adalah pelabuhan satu-satunya milik Kota Probolinggo, dari pusat kota jaraknya 2 km. Pelabuhan Tanjung Tembaga adalah pelabuhan bersejarah, dahulu pada jaman Penjajahan Jepang pelabuhan ini sebagai tempat pendaratan tentara penjajah dan bongkar muat keperluan penjajahan (seperti yang kita lihat di Museum Brawijaya Malang). Pada perkembangannya Pelabuhan Tanjung Tembaga menjadi pelabuhan ikan, bongkar muat kapal-kapal besar, pelabuhan antar pulau, serta pelabuhan transit bagi kapal-kapal dari daerah lain. Bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Tembaga ada Pabrik Kayu lapis terbesar, perkampungan nelayan dan tempat pelelangan ikan. Dari Pelabuhan Tanjung Tembaga pula kita bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari yang sangat indah.

Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo terletak pada posisi pada 01º 03’ 00” lintang selatan dan pada posisi 113º 13’ 00” bujur timur, yang mempunyai karakteristik dasar laut landai dan berpasir dengan kedalaman kolam terendah adalah minus 2 m LWS. Kedalaman alur perairan pelabuhan minus 12 m LWS berjarak kurang lebih 900 meter dari ujung pelabuhan dengan arus air yang tenang karena lokasi pelabuhan yang terlindung oleh Pulau Gili Ketapang yang berada di Selat Madura. Pelabuhan Probolinggo Staadblad 1920 Np 42450 Stb No. 546 diperuntukkan sebagai ”Pelabuhan pantai” yang secara geografis pelabuhan tersebut sangat strategis karena terletak diantara pelabuhan Pasuruan dan pelabuhan Panarukan.

Pada awalnya pengoperasian pelabuhan Probolinggo digunakan untuk keperluan ”Pelayanan Antar Pulau/Pelayanan Rakyat dan berkembang menjadi Pelabuhan Terbuka untuk kegiatan Pelayaran Luar Negeri dan Antar Pulau” yang meskipun dalam pelaksanaannya masih melalui rede transport (Angkutan Badar). Dengan demikian jelaslah bahwa peranan pelabuhan Probolinggo cukup penting sebagai salah satu sistem transportasi serta secara tidak langsung keberadaaannya mempunyai kontribusi didalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik skala lokal, regional maupun nasional. Pelabuhan ini mempunyai potensi pasar untuk dikembangkan sebagai pelabuhan yang melayani arus barang dan kapal dari industri yang berada di Hiterlandnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambat 4 di bawah ini :

Gambar 4
Pelabuhan Tanjung Tembaga

Sumber : Pengamatan di lapangan

Fasilitas yang dimiliki Pelabuhan Probolinggo hingga saat ini adalah :

a. Kolam Pelabuhan

Luas Kolam pelabuhan yang ada hingga saat ini tersedia sekitar 5,61 ha dengan kedalaman berkisar antara minus 1,50 m sampai dengan 3,50 m LWS, sedangkan alur masuk ke Pelabuhan (Kanal) mempunyai kedalaman berkisar antara minus 1,50 m sampai dengan minus 2,00 m dengan kondisi seperti tersebut dan ditambah dengan perbedaan pasang surut air yang mencapai kurang lebih 3,00 m, maka ukuran kapal dengan bobot mati 500 DWT

merupakan ukuran kapal terbesar yang dapat masuk ke kolom pelabuhan pada saat air pasang.

b. Penahan Gelombang

Untuk melindungi aktifitas bongkar/muat didaerah kolam pelabuhan terhadap pengaruh ombak besar serta arus laut maka dibuatlah konstruksi *breakwater*. Fasilitas penangkis gelombang yang sekaligus diyakini sebagai pelindung alat masuk pelabuhan ini dibuat ke laut sepanjang 1,158 m dan panjang total kedua sisi 2,3 m.

c. Tambatan

Saat ini pelabuhan Probolinggo mempunyai tempat tambat sepanjang 961 m yang cukup memenuhi untuk tempat sandar bongkar/muat barang. Tambatan tersebut adalah tambatan beton lengkap dengan boulder dan forder dari kayu. Selain itu terdapat pula fasilitas tambatan pinggiran sepanjang 1.807 m yang hanya dapat dipergunakan oleh layar kecil pada saat air pasang.

d. Dermaga

Panjang dermaga pelabuhan Probolinggo adalah 2.200 m, bangunan dermaga sendiri aslinya terdiri dari batu karang diikat dengan spesi untuk penahan dinding dan permukaannya kemudian diatasnya diperkeras dengan lapisan cor beton. Karena pengaruh cuaca dan keadaan maka sering kali dilakukan perbaikan guna menjaga keutuhan bangunan agar siap operasi.

e. Gudang dan *Open Strorage*

Gudang yang tersedia di Pelabuhan Probolinggo sebanyak 9 unit dengan luas lantai berjumlah 19.158 m^2. Selain fasilitas tersebut tersedia pula lapangan penumpukan (*open storage*) dengan luas lantai 10.000 m^2 yang menggunakan konstruksi perkerasan batu yang dilapisi aspal beton serta dalam kondisi terawat dan masih baik.

f. Peralatan Bongkar / Muat

Karena terbatasnya bobot mati kapal dapat masuk ke kolam pelabuhan, maka untuk pelayanan nusantara dan samudera memerlukan peralatan bantu yang berupa kapal tongkang untuk memuat ataupun membongkar barang. Saat ini Pelabuhan Probolinggo haya memiliki sebanyak 1 unit kapal tongkang untuk suply air dengan kapasitas 2.000 ton.

Disamping itu menurut hasil pengamatan peneliti dilapangan tanggal 16 Februari 2009 pukul 14.00 bahwa Pelabuhan Tanjung Tembaga memang memiliki potensi berupa potensi pasar yang melayani arus barang dan kapal dari industri yang berada di Hiterlandnya yang merupakan daerah yang berpotensi memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Tanjung Tembaga dalam mengirim dan menerima muatan secara maksimal.

Pelabuhan Probolinggo belum mempunyai peralatan bongkar/muat langsung seperti forklift, crane dan mobile crane. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan ini perusahaan lain yang menggunakan jasa Pelabuhan Probolinggo harus menyediakan sendiri kebutuhan peralatan tersebut seperti PT.KTI, Pabrik Kertas Leces dan lain-lain. Di Pelabuhan Probolinggo saat ini terdapat 310 tenaga buruh inti dengan 150 tenaga buruh cadangan. Tenaga kerja buruh untuk nelayan bongkar/muat biasanya berasal dari warga sekitar pelabuhan, mereka bergabung dalam satu group yang terdiri dari 20 orang. Produktifitas per group di Pelabuhan Probolinggo adalah 21 ton (group/jam). Jam kerja untuk setiap gang di Dermaga Umum dibagi dalam 2 shift.

Saat ini Pelabuhan Probolinggo tersedia tempat penampungan air bersih dengan kapasitas 350 ton air bersih dan fasilitas itu masih dapat ditingkatkan. Adapun daya listrik yang tersedia di Pelabuhan Probolinggo saat ini mencapai 59 KVA. Pelabuhan Probolinggo menyediakan fasilitas perbaikan kapal untuk melayani perbaikan-perbaikan kapal-kapal besi atau kapal kayu besar tonase dibawah 1000 DWT, golongan kapal ini milik PT. Pelni terletak di tepi kolam Pelabuhan.

Di daerah belakang pelabuhan atau daerah hiterland adalah daerah-daerah dibelakang kawasan pelabuhan yang merupakan daerah penyangga operasional pelabuhan yang berpotensi memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Probolinggo dalam mengirim dan menerima muatan (Kargo) secara maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.

Gambar 5
Daerah Hiterland

Sumber : Pengamatan di lapangan

Peningkatan besarnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Probolinggo sampai saat ini maupun masa yang akan datang tidak lepas dari potensi perkembangan daerah. Dan daerah yang dapat mendukung operasional Pelabuhan Probolinggo adalah wilayah Jawa Timur bagian timur, diantaranya Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo.

3) Sektor Perkebunan

Kota Probolinggo adalah Kota Bayuangga, yang artinya Kota Angin (Bayu), Kota Anggur (Ang), dan Kota Mangga (Ga). Para wisatawan dapat memperoleh anggur dan mangga pada penjual di pinggir jalan maupun di pasar buah. Hal ini digunakan sebagai pegangan dan sangat diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan dan menjaga kelestarian di Kota Probolinggo.

Usaha perkebunan di Kota Probolinggo merupakan usaha perkebunan rakyat dengan lahan terbatas dan hanya dijadikan sebagai usaha penunjang kehidupan keluarga. Produksi tanaman perkebunan tahun 2006 mulai memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Perkembangan produksi tersebut terdapat pada tanaman rambutan, jambu biji, pepaya, pisang, blimbing dan mangga dengan peningkatan masing-masing : rambutan (8,33%), jambu biji (33,17%), pepaya (19,35%), pisang (44,38%), blimbing (24,82%) dan mangga (115,00%), sedangkan tanaman yang mengalami penurunan antara lain alpukat sebesar -19,70%, anggur sebesar -81,31%, sawo sebesar -45,67%, nangka sebesar

-36,45%. Kalau dibandingkan dengan tahun 2005, hal ini disebabkan pemeliharaan tanaman oleh petani tidak sempurna. Perkembangan tanaman perkebunan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 16 berikut :

Tabel 16
Perkembangan Tanaman Perkebunan Tahun 2006 di Kota Probolinggo

No.	Komoditi	Tahun 2005		Tahun 2006		Perkembangan Produksi (%)
		Jumlah Pohon (buah)	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon (buah)	Produksi (Ton)	
1.	Alpokat	326	3,6	315	2,05	-19,70
2.	Rambutan	12	0,40	262	0,10	8,33
3.	Jambu Biji	1.750	26,81	1.736	38,24	33,17
4.	Anggur	8.648	96,40	8.633	33,12	-18,31
5.	Sawo	1.314	78,40	1.348	28,18	-45,67
6.	Pepaya	6.144	111,90	6.060	161,11	19,35
7.	Pisang	17.364	254,65	18.882	1.202,48	44,38
8.	Blimbing	4.459	77,10	4.715	81,32	24,82
9.	Mangga	60.024	5.033,75	60.224	5791,29	115,00
10.	Nangka	4.218	172,38	5.849	105,90	-36,45

Sumber : Dinas Pertanian Kota Probolinggo tahun 2007

Pada bidang ini yang paling potensial dikembangkan adalah mangga dan anggur. Hampir semua penduduk Kota Probolinggo mempunyai tanaman Pohon Mangga, namun secara khusus investor belum ada yang mengelola untuk menanam pohon mangga lengkap dengan pengemasan maupun pengembangannya, maksud pengembangannya dibuat dodol mangga, dibuat syrup, dan lain-lain. Padahal Kota Probolinggo untuk tanaman mangga kesuburannya ditunjang dengan adanya angin Gending. Meskipun para petani mangga tidak mempunyai lahan yang khusus, hasilnya banyak dikirim ke luar kota maupun ke luar negeri. Adapun jenis mangga di Kota Probolinggo ada 2 jenis yang terkenal yaitu mangga arum manis dan manalagi. Berikut merupakan contoh tanaman mangga di Kota Probolinggo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6 berikut.

Gambar 6
Mangga Kota Probolinggo

Sumber : Pengamatan di lapangan

Setiap rumah penduduk di Kota Probolinggo yang lahannya agak luas mulai menyenangi untuk menanam anggur, selain untuk kerindangan rumah juga untuk penghasilan keluarga. Selain mangga, potensi perkebunan yang dimiliki Kota Probolinggo adalah anggur. Gambar 7 berikut merupakan contoh dari tanaman anggur di Kota Probolinggo.

Gambar 7
Anggur Kota Probolinggo

Sumber : Pengamatan di Lapangan

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo, sebagaimana disebutkan dalam http://www.hortikultura.deptan.go.id diakses pada tanggal 24 mei 2009, Pengembangan anggur di Kota Probolinggo merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan citra Probolinggo sebagai kota “Bayuangga” (bayu = angin; angga = anggur dan mangga). Peluang keberhasilan

pengembangan anggur di Kota Probolinggo cukup tinggi, karena ekosistem yang cocok, juga kebutuhan buah anggur bagi masyarakat yang belum terpenuhi. Secara agroekosistem, Kota Probolinggo cocok untuk kawasan pengembangan tanaman anggur. Produksi buah anggur di Kota Probolinggo sebanyak 33,12 ton, masih jauh dari permintaan yang mencapai 162 ton pada tahun 2006, belum termasuk kebutuhan hasil olahan. Gambaran ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan agribisnis anggur di Kota Probolinggo sangat besar. Disamping itu Kota Probolinggo juga berdekatan dengan Kebun Percobaan Anggur Banjarsari, milik Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian, keberadaan kebun ini tentunya sangat menunjang pengembangan agribisnis anggur di Kota Probolinggo.

Saat ini telah tersedia varietas unggul baru yaitu " PRABU BESTARI" yang dirilis melalui Keputusan Mentan RI No. 600/Kpts/SR.120/11/2007 tanggal 7 November 2007 sebagai varietas unggul. Varietas ini mempunyai mutu yang unggul, produksi stabil dengan hasil cukup tinggi. Pada tanaman umur produktif (5 tahun ke atas) mampu menghasilkan buah 20 – 30 kg/pohon/tahun. Dalam rangka pengembangan anggur di Kota Probolinggo, telah diberikan bantuan bibit anggur pada tahun 2006 sebanyak 614 pohon. Pada tahun 2007 Kota Probolinggo mendapat bantuan dana PMUK untuk penumbuhan dan pemantapan anggur.

Walikota Probolinggo bertekad mengembalikan citra Kota Probolinggo sebagai kota anggur dengan dukungan dari instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Asosiasi Anggur Prabu Bestari yang diresmikan tanggal 13 Desember 2007 dan lounching panen anggur Prabu Bestari bersama Dirjen Hortikultura dan Walikota Probolinggo pada tanggal 15 Agustus 2008. Ditjen Hortikultura (Direktorat Budidaya Tanaman Buah) sebagai instansi teknis mendukung pengembangan anggur di Kota Probolinggo melalui pembinaan-pembinaan dan fasilitasi (seperti PMUK, dll). Dalam upaya itu juga, peluang pengembangan kawasan anggur untuk Kota Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso prospektif. Ditjen Hortikultura juga melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat lainnya serta *stake holder* terkait. Tujuan pengembangan anggur varietas unggul ini adalah untuk mengembangkan

agribisnis anggur, meningkatkan produksi dan mutu, memotivasi petani dan petugas sebagai penggerak agribisnis anggur, memperluas pengembangan sentra produksi anggur serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Adapun sasarannya adalah berkembangnya komoditas anggur di Kota Probolinggo.

b. Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Investasi

Jalan keluar yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu dengan meningkatkan investasi telah diwujudkan dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, juga beberapa upaya lain, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih merupakan suatu perencanaan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo meliputi:

1) Sebagai Koordinator

(a) Pengendalian dan Pengawasan terhadap Kegiatan PMDN dan PMA

Kegiatan ini merupakan monitoring ke sejumlah PMA dan PMDN yang ada di Kota Probolinggo untuk mengetahui sejauhmana perkembangan usaha dan produksinya dengan menjalin hubungan yang baik dengan para investor serta membantu penyelesaian/memecahkan masalah yang dihadapi para investor dalam melaksanakan kegiatan investasi di Kota Probolinggo.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, beliau menjelaskan bahwa :

> “ …..Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap PMDN dan PMA dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung, monitoring berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang wajib disampaikan oleh PMDN dan PMA kepada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal atau BPM per semester bagi PMDN dan PMA yang belum memiliki IUT dan per tahun bagi PMDN dan PMA yang sudah memiliki IUT, sedangkan monitoring secara langsung, dilakukan oleh personil Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dengan langsung datang ke proyek investasi”.
> (Hasil wawancara dengan Bapak Yuda hartanto, tanggal 10 Februari 2009, pukul 11.00, di ruang kerjanya)

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah keterbatasan sarana mobilisasi dalam pelaksanaan monitoring secara langsung ke proyek PMDN maupun PMA. Upaya pemecahannya adalah dengan pengalokasian anggaran untuk penambahan sarana transportasi dinas.

2) Sebagai Stimulator

(a) Penyusunan Buku Profil Potensi tentang Potensi Unggulan Kota Probolinggo

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan promosi potensi daerah Kota Probolinggo dengan menyediakan sarana atau media informasi yang memudahkan masyarakat maupun investor untuk mengetahui seberapa besar peluang berusaha yang dapat dikembangkan di Kota Probolinggo untuk itu Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal menyediakan Buku Profil Investasi Kota Probolinggo yang berisi seluruh potensi meliputi bidang perikanan, industri, pelabuhan dan perkebunan. Buku profil investasi Kota Probolinggo yang telah disusun merupakan kerjasama antara Bappeda dan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal.

Dalam kegiatan pembuatan Buku Profil tentang potensi unggulan ini telah dibuat sebanyak 1.000 (seribu) eksemplar, adapun materi yang ditampilkan berisi potensi dan peluang usaha di bidang industri, perdagangan, perikanan, pelabuhan dan perkebunan.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini minimnya informasi dan data yang diperoleh dari masing-masing unit kerja mengenai jumlah potensi yang mempunyai nilai jual tinggi. Upaya pemecahannya adalah mencari informasi maupun data langsung pada sumbernya serta melihat langsung ke obyek dan lokasi pengambilan data. Tindak lanjutnya adalah menghimpun, menyeleksi dan memasukkan informasi maupun data yang mempunyai potensi untuk dipromosikan serta memiliki nilai cadangan (deposit) yang tinggi ke dalam CD Rom.

(b) Promosi Potensi Daerah

Kegiatan promosi potensi daerah ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi maupun produk unggulan yang mempunyai nilai jual

tinggi yang diharapkan mampu menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga mempromosikan Prosedur Perijinan Penanaman Modal di Kota Probolinggo yang diupayakan dengan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (*One Stop Service)*. Hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal dalam bidang penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan investor dari luar maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya. OSS adalah lembaga perijinan yang memberikan pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang umumnya berada di wilayah kota/kabupaten. Lembaga ini merupakan ujung tombak pelayanan perizinan dimana masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk menyerahkan berkas perijinan dan menerima dokumen perizinan. Di Indonesia, bentuk kelembagaan OSS dapat berupa Unit Pelayanan Terpadu (UPT), Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) atau Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. OSS diharapkan mampu melayani seluruh perijinan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha di daerah masing-masing, mulai dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), ijin usaha (SIUP, TDP, TDI, IUT, IUI, TDG, dll) atau ijin per sektor seperti ijin usaha restora, ijin pendirian salon, dll

Hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal dalam bidang penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan investor dari luar maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya.

Tujuan dari OSS untuk memberikan kemudahan pada dunia usaha karena dapat menciptakan iklim kondusif yang dapat meningkatkan kegairahan dunia usaha. Disamping melayani perizinan, OSS dapat dijadikan sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan masyarakat. Melalui OSS dengan seluruh kelengkapannya, pengurusan perizinan usaha akan menjadi mudah dan murah yang membuat pelaku usaha terhindar dari biaya ekonomi tinggi yang biasanya terjadi pada saat proses pengurusan izin.

Prinsip Pelayanan OSS:

a. Kesederhanaan prosedur pelayanan secara mudah dan cepat;
b. Jelas dan pasti, mengenai waktu penyelesaian serta biayanya;
c. Keamanan proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum;
d. Keterbukaan, masyarakat mudah memohon proses pelayanan;
e. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan adil.

Dalam kegiatan Promosi Potensi Daerah ini, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal telah mengikuti beberapa even pameran yang berskala nasional maupun internasional, yaitu :

a. Musyawarah nasional (munas) III Asosiasi Pemkot seluruh Indonesia (Apeksi) dalam Indonesia City Expo (ICE) dan mozaik seni nusantara di The Sunan Hotel, Solo pada 23-27 Juli 2008.

Wakil dari UKM Kota Probolinggo yang mengikuti pameran tersebut (Puguh) dalam wawancara, beliau menambahkan bahwa :

> ".....Selama ICE, wakil dari Kota Probolinggo memamerkan buah dan produk milik sekitar 14 UKM (usaha kecil dan menengah). Mulai anggur, le-ollena, tape bakar, telor asin, bordir, keripik telo, kripik ikan, rambak, beragam kerupuk, carang mas dan masih banyak yang lain. Yang membanggakan, seluruh produk yang dibawa Kota Probolinggo habis terjual dalam waktu beberapa jam saja. Sebanyak 60 kilogram anggur yang dikemas dalam paket per 2 ons, habis terjual. Padahal harganya lumayan mahal, yaitu Rp 8.000 per 2 ons. Sama dengan anggur, semua mangga juga langsung terjual. Sebanyak 80 kilogram mangga yang dibawa, dijual dengan harga antara Rp 4.000-Rp 6.000 per kilogram. Delegasi lain yang kehabisan sampai harus memesan khusus untuk dikirim ke kota masing-masing." (Hasil wawancara dengan Bapak Puguh, tanggal 24 Februari, pukul 10.00, di rumahnya)

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah minimnya dukungan media promosi seperti brosur, pamflet, buku profil potensi tentang potensi unggulan di Kota Probolinggo dan minimnya dukungan dana. Upaya pemecahannya adalah meminta dukungan dari instansi terkait sehubungan dengan pengadaan brosur/pamflet mengenai potensi dan produk unggulan Kota

Probolinggo serta mengalokasikan dana sesuai prioritas kegiatan pelayanan. Tindak lanjutnya adalah mengadakan sendiri pembuatan brosur/pamflet oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal serta mengajukan kenaikan dana untuk tahun anggaran berikutnya.

3) Sebagai Entrepreneur

(a) Peningkatan Kinerja Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi personil Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. Adapun kegiatannya meliputi magang, pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, maupun studi banding. Dengan kegiatan ini diharapkan kinerja Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dapat meningkat serta diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada para investor. Hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal serta penyelenggaraan standar pelayanan minimal dalam bidang penanaman modal. Di sini tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kinerja Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal.

Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal juga melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Probolinggo, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan PP Nomor 25 tahun 2000, maka persaingan dalam menarik investasi di dalam Negeri tidak lagi terjadi hanya terjadi antar propinsi tetapi juga antar Kabupaten/Kota. Dengan demikian hanya daerah-daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang dapat meberikan Pelayanan investasi yang prima yang menjadi pilihan utama investor dalam melakukan investasi oleh karena itu sangat perlu adanya peningkatan daya saing masing-masing daerah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia secara keseluruhan dalam bentuk investasi.
2. Perlu adanya kebijakan investasi pada Tingkat Nasional selain itu diperlukan pula adanya strategi kebijakan investasi pada tingkat daerah, mengingat pada

dasarnya kewenangan penanganan penanaman modal ada pada Kabupaten/Kota.

- Mengembangkan/mengidentifikasi potensi investasi di daerah yang dituangkan dalam peta investasi daerah dan profil-profil investasi.
- Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan menyediakan insentif/kemudahan, menghapus/mengurangi pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pajak produksi hasil tanaman perkebunan dan retribusi pemakaian jalan dan angkutan barang yaitu penetapan kebijakan Pemerintah Kota probolinggo tentang pemberian insentif bagi investor, antara lin berupa penurunan tarif pajak penerangan jalan bagi industri yang semula sebesar 5% (Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 4 Tahun 1998) menjadi hanya 3% (Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 9 Tahun 2002).
- Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah.
- Mengembangkan sumber daya manusia baik aparat pemerintah maupun pelaku bisnis di daerah, melalui pelatihan-pelatihan.
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi. Melalui penganekaragaman jenis dan mutu pelayanan informasi, kerjasama promosi dan layanan informasi melalui internet.
- Meningkatkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar daerah Kabupaten/Kota dan dengan atau antara Propinsi atau dengan pusat, serta melalui kegiatan dialog lintas sektoral dan dialog dengan dunia usaha sebagai penanaman modal.

Keberhasilan dan Prestasi yang berhasil diraih oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, sebagai berikut :

a) Bekerjasama dengan PUPUK (Asian Foundation) Tahun 2005 / 2006 di bidang Asistensi Pengembangan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/425.308/2005 050/PS-EA/OSS/VII/2005

b) Penghargaan dari Badan Koordinasi Wilayah III Malang sebagai Icon / Unggulan Citra Pelayanan Prima dalam Kompetisi Pelayanan Publik antar Kabupaten / Kota Tingkat BAKORWIL III Malang Tahun 2007.

c) Pada Tahun 2007, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal bekerjasama dengan Pihak Ketiga, yaitu dengan PT. KOKEK (Keuangan dan Ekonomi) Surabaya sebagai Konsultan Pendamping, dalam bentuk kegiatan Sertifikasi Standart Management Mutu (SMM) ISO 9001-2000. Mulai tanggal 02 Juni 2008 Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo berhasil mendapatkan dan telah menerapkan Sertifikat SMM ISO 9001:2000 dari Badan Sertifikasi Nasional Multi Agung Lestari Jakarta, serta berlaku sampai dengan 01 Juni 2011..

d) Pada 10 Juni 2008, mengadakan kerjasama dengan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Propinsi Jawa Timur. Dengan mengadakan kegiatan monitoring dan pendampingan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik, untuk mengaplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4) Sebagai Fasilitator

(a) Penyelenggaraan Forum Investasi dan Temu Usaha

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pertemuan dan hubungan kerja sama dengan para Asosiasi Pengusaha Asing, Kamar Dagang dan Industri, Kedutaan Besar Negara Asing, Konsulat Jenderal, Pengusaha Industri Kecil, maupun dengan pihak Badan Penanaman Modal Pusat dan Propinsi Jawa Timur. Disamping kegiatan tersebut juga mengadakan studi banding dengan fokus pemanfaatan areal sekitar yang terdapat di Kota Probolinggo, sehingga manfaat dari kegiatan ini diharapkan mampu menjaring para investor sekaligus dapat memberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai potensi serta produk unggulan yang terdapat di Kota Probolinggo. Adapun kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi serta pelaksanaan kerja sama dengan investor dari luar dan dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di Kota Probolinggo.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah belum optimalnya koordinasi dan kerja sama dengan para Asosiasi Pengusaha Asing, Kedutaan Besar Negara Asing, Konsulat Jenderal maupun dengan Pengusaha Industri Kecil (UKM). Upaya pemecahannya adalah meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama secara intensif serta berkesinambungan dengan pihak Badan Penanaman Modal Pusat maupun Propinsi Jawa Timur. Tindak lanjutnya adalah mengikuti secara aktif setiap kegiatan Forum Investasi atau Temu Usaha yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Pusat maupun Propinsi Jawa Timur.

c. Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Kota Probolinggo

1) Faktor Penghambat Investasi di Kota Probolinggo

Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dalam perjalanan sejak berdirinya hingga kini, tentunya tidak dapat langsung berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun masih ada permasalahan atau hambatan/kendala yang harus dihadapi. Hal ini dapat dilihat dalam permasalahan yang dihadapi, yaitu ”Mengapa sejak terbentuknya Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal hingga kini masih ada saja investor yang mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di Kota Probolinggo?”

Faktor penyebab dari permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat dipisahkan antara faktor yang berasal dari daerah sendiri dengan faktor-faktor lain yang bersifat nasional dan bahkan internasional. Adapun penyebab atau penghambat bagi peningkatan investasi di Kota Probolinggo berdasarkan dokumen Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal mengenai ”Upaya-upaya Peningkatan Kinerja Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo”, disebutkan antara lain karena stabilitas keamanan dan politik nasional dan internasional yang masih belum sepenuhnya mendukung, juga adanya kesan dari investor luar negeri bahwa iklim investasi di Indonesia belum sepenuhnya terjamin karena masih banyaknya demo-demo dari buruh, serta belum adanya pemberian fasilitas lebih bagi investor.

Menurut Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, faktor yang paling berpengaruh terhadap minat investor untuk menanamkan modal adalah faktor keamanan, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

" ..... Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat investasi adalah faktor keamanan. Sebenarnya Kota Probolinggo cukup terjamin keamanannya namun faktor keamanan tidak bisa dilihat dari satu daerah saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keamanan secara nasional. Hal ini sangat berpengaruh terhadap minat calon investor untuk menanamkan modalnya, terutama bagi calon investor asing. Banyaknya demonstrasi dan konflik di daerah bisa membuat takutcalon investor akan jaminan keamanan terhadap modal yang akan ditanamkannya. (Hasil wawancara dengan Bpk. Yuda Hartanto, tanggal 10 Februari 2009, di ruang kerjanya, di Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Probolinggo).

Sedangkan faktor penghambat yang secara khusus terdapat di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Kesulitan mendapatkan dan mendirikan perusahaan karena mengahadapi proses yang panjang dan berbelit-belit.
2. Belum adanya keterkaitan antar instansi
3. Proses perijinan yang panjang dan memakan waktu lama.

Jadi, meskipun suatu daerah memiliki potensi yang cukup tinggi namun keamanannya tidak terjamin maka hal ini membuat calon investor mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal di daerah tersebut.

2) Faktor Pendukung Investasi di Kota Probolinggo

Banyaknya investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang tertarik menanamkan modalnya di Kota Probolinggo ditunjang oleh faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

(a) Letak Kota Probolinggo yang strategis

Letak geografis Kota Probolinggo cukup strategis yaitu merupakan Kota Transit yang menghubungkan kota-kota Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Jember yang berada disebelah timur dan kota-kota Pasuruan, Malang dan Surabaya yang berada disebelah Barat Kota Probolinggo. Dengan demikian Kota Probolinggo menjadi Kota Transit untuk lalu lintas perekonomian

di Jawa Timur khususnya Kota Probolinggo dalam memasarkan hasil-hasil produksinya baik dipasar domestik maupun pasar global.

Investasi merupakan modal utama Pemerintah Kota mengiringi kemajuan pembangunan. Sebagaimana disebutkan dalam website resminya pemerintah daerah Probolinggo (www.probolinggo.go.id), menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan tingkat investasi karena penanaman modal merupakan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana yang diucapkan oleh Bapak H.M. Buchori, SH, M.Si selaku Bapak Walikota Probolinggo sebagai berikut :

" ..... pemahaman yang kuat tentang kondisi daerah, demografi dan type umum masyarakat warga Kota Probolinggo menjadi titik tolak atau starting point bagi Kepala Daerah yaitu Walikota Probolinggo guna mengawal arah kebijakan pembangunan Kota Probolinggo sampai ketujuan yang diharapkan. Langkah-langkah strategis yang menuju pada tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat *(balancing of power*) merupakan tolok ukur utama keberhasilan pembangunan Kota Probolinggo.

Tujuan utama adalah untuk peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Investasi dari topografis adalah potensi yang cukup besar dimiliki Kota Probolinggo selain wujud partisipasi masyarakat, hal ini merupakan modal utama Pemerintah Kota mengiringi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek yaitu perindustrian, perdagangan, pendidikan dan perhubungan darat maupaun laut (transportasi)."

Jadi, letak Kota Probolinggo yang strategis berpengaruh baik bagi perkembangan investasi karena dapat digunakan untuk memasarkan hasil-hasil produksi baik dipasar domestik maupun pasar global.

Dan faktor pendukung lainnya yang terdapat di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

(b) Potensi Investasi yang dimiliki Kota Probolinggo

Kota Probolinggo kaya akan potensi diantaranya dari sektor industri, perdagangan, perikanan, pelabuhan dan perkebunan yang berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan potensi investasi ini dapat dijadikan gambaran dari situasi dan kondisi serta prospek dalam melakukan kegiatan usaha.

(c) Jaminan keamanan yang dapat diberikan oleh daerah tersebut.

Pemerintah Daerah sangat mendukung investasi, maka dari itu pemerintah menjamin keamanan yang diberikan kepada pihak investor dalam menanamkan

modalnya di Kota Probolinggo. Dalam hal ini pihak kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya program *call center* yang dapat dihubungi masyarakat apabila terjadi tindakan kriminalitas maupun hal yang tidak berkenan di hati masyarakat di dalam lingkup masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat dapat melapor kapan saja dan dimana saja karena dalam sosialisasinya pihak kepolisian memasang spanduk-spanduk di protokol jalan Kota Probolinggo yang isinya berisi imbauan beserta nomor telepon yang bisa dihubungi dan pelayanan itu berjalan 24 jam.

(d) Sumber daya manusia yang sangat mendukung investasi

Faktor sumber daya merupakan salah satu modal dalam berusaha dan keberhasilan usaha sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia sebagai tenaga kerja yang berkualitas. Ketersediaan sumber daya manusia di Kota Probolinggo juga merupakan faktor penentu untuk dapat mengelola sumber daya alam yang ada.

Sebagaimana Dingkapkan oleh Bapak Budi Kristanto selaku Kepala Bappeda Kota Probolinggo di ruang kerjanya sebagai berikut :

”.....dari piramida penduduk Kota Probolinggo tahun 2007 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif 18 tahun keatas yang berjumlah 124.413 jiwa (66,61%) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif. Dari gambaran ini terlihat bahwa Kota Probolinggo memiliki potensi SDM yang memadai karena jumlah usia produktif yang ada cukup besar. Di samping itu karakteristik utama masyarakat Kota Probolinggo yang ulet, tegas, terbuka dan lugas bila dikelola dan disalurkan dengan baik merupakan modal dasar yang cukup besar peranannya dalam pembangunan ”.

(Hasil wawancara dengan Bpk. Budi Kristanto, tanggal 11 Februari 2009, di ruang kerjanya)

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penduduk usia produktif sebagai angkatan kerja dan karakteristik masyarakat yang baik merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi daya tarik pihak investor. Kerjasama antara masyarakat dan pihak Pemerintah Daerah dalam memajukan investasi daerah juga berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya ikut andil masyarakat yang memiliki UKM dalam Musyawarah nasional (munas) III Asosiasi Pemkot seluruh Indonesia (Apeksi) dalam Indonesia

City Expo (ICE) dan mozaik seni nusantara di The Sunan Hotel, Solo pada 23-27 Juli 2008 dalam rangka mempromosikan potensi daerah Kota Probolinggo.

(e) Sistem perpajakan yang pasti

Adanya sistem perpajakan yang telah dibuat, disusun dan diatur secara pasti dan tepat membuat para investor dapat mengatur dengan rinci semua hal yang berhubungan dengan usahanya, sehingga investor dapat mereka-reka tentang perkembangan dan prospek yang akan mereka peroleh dalam melaksanakan investasi tersebut.

B. Analisa dan Interpretasi Data

1. Potensi-potensi Investasi yang Terdapat di Kota Probolinggo

Potensi daerah atau disebut juga sumber daya daerah merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam melakukan pembangunan ekonomi suatu daerah, bahkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah juga dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki daerah itu, baik potensi alam, potensi finansial, potensi teknologi, maupun potensi manusianya dan potensi-potensi lainnya. Walaupun potensi sumber daya daerah tersebut bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, namun pada umumnya daerah yang ekonominya maju adalah daerah yang mempunyai potensi yang tinggi, sebaliknya daerah yang terbelakang dalam pembangunan ekonominya adalah daerah yang minim potensi. Hal ini terjadi karena potensi-potensi daerah tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan dalam dunia usaha,sebagaimana disebutkan dalam Arsyad (1999:122) bahwa pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha misalnya lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya.

Dari penyajian data di depan dapat dilihat bahwa selain letaknya yang strategis, kondisi alam yang menguntungkan, potensi daerah yang sekaligus sebagai sektor-sektor unggulan daerah Kota Probolinggo juga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, yang meliputi potensi industri, perdagangan, pelabuhan, perikanan dan perkebunan. Potensi-potensi inilah yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk menarik minat para investor agar menanamkan modalnya di Kota Probolinggo, dimana potensi-potensi yang

dimiliki tersebut masih banyak yang belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi daerah juga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi investor dalam memutuskan lokasi investasi terutama disebabkan oleh faktor kedekatan dengan bahan baku industri karena dengan mendirikan pabrik dekat dengan bahan baku, selain mempermudah dalam perolehan bahan baku juga dapat menghemat biaya transportasi. Selain dengan potensi alam yang dimiliki tersebut, iklim usaha dan investasi di Kota Probolinggo juga didukung oleh kualitas SDM yang tinggi, serta penyediaan infrastruktur yang cukup memadai.

Melihat potensi daerah, sekaligus sebagai potensi investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dinilai tinggi, dimana itu belum tentu juga dimiliki oleh daerah lain. Inilah salah satu keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo. Namun, dengan potensi daerah yang tinggi belum tentu dapat menjamin keunggulan ekonomi daerah tersebut, jika potensi tersebut tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah secara baik dan benar dapat memberi masukan yang besar bagi PAD, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2. Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Investasi

Menurut Arsyad (1999:120-121), ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah harus pula melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan investasi sebagai perwujudan dari peran penting Pemerintah Daerah tersebut. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam meningkatkan investasi di wilayah Kota Probolinggo ini sebenarnya dapat dilihat dari arah kebijakan yang ditetapkan, program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal sebagai unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal. Sejak berdirinya hingga saat ini sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan cara-cara yang diupayakan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi, sebagaimana disajikan di depan, pada dasarnya merupakan upaya peningkatan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sebagai berikut :

a) Sebagai Koordinator

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Kegiatan PMDN dan PMA

Kegiatan ini diperlukan tidak hanya untuk mengawasi jalannya kegiatan dan perkembangan PMDN dan PMA, tetapi juga untuk mengadakan pembinaan dan saling membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi para investor sehingga dapat terjalin hubungan yang kondusif antara Pemerintah dengan para investor. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman PMDN dan PMA mengenai prosedur perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan ini juga dimaksudkan untuk menjaring proyek-proyek investasi yang belum memilik perijinan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dapat menjaga kewibawaan Pemerintah dalam melaksanakan kedisiplinan dalam penyelenggaraan proyek penanaman modal sesuai dengan peraturan dan undang-undang penanaman modal.

Sebagaimana dicantumkan dalam pedoman pelaksanaan pengendalian penanaman modal, bahwa aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengendalian dan pengawasan ini meliputi Konsistensi Lokasi Proyek, Konsistensi Bidang Usaha dan/atau Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi, Konsistensi Pemanfaatan Barang Modal, Konsistensi Pemanfaatan Bahan Baku, Konsistensi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Konsistensi Penggunaan Lahan, Konsistensi Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek, dan Konsistensi terhadap ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan (SP). Dengan menjaga konsistensi proyek-proyek PMA dan PMDN terhadap aspek-aspek tersebut, dapat dihindari adanya proyek investasi yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara, seperti pengeksploitasian sumber daya yang berlebihan.

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan sejumlah personil yang memadai dan memahami peraturan perundang-undangan tentang penanaman

modal serta bidang-bidang lain yang berkaitan, seperti bidang ekonomi, hukum, dan produksi. Oleh karena itu, dengan jumlah personil Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal yang terbatas, yaitu 14 personil, perlu diadakan penambahan personil, terutama yang berkompeten dalam bidang ini melalui recruitment secara "*Merit Sistem*", yaitu sistem penerimaan pegawai berdasarkan faktor-faktor obyektif, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan seleksi secara administrasi dan melalui test (tertulis, lesan dan *performance test*), sehingga akan didapatkan pegawai yang profesional sebagai mana yang dibutuhkan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal.

b) Sebagai Stimulator

Penyusunan Buku Profil Investasi tentang Potensi Unggulan Kota Probolinggo

Buku Profil Investasi tentang Potensi Unggulan Kota Probolinggo dibuat sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan promosi. Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat baik sebagai upaya penyediaan informasi potensi investasi, sehingga dapat membantu masyarakat terutama para pengusaha dan pemilik modal untuk mengetahui potensi investasi di Kota Probolinggo secara lebih detail, dimana dalam buku profil potensi investasi ini dijelaskan lebih rinci mengenai proses produksi; prospek pemasaran; pemilihan lokasi perusahaan; kebutuhan lahan, tenaga kerja dan fasilitas sehingga dapat dipertimbangkan kelayakan investasinya.

Saat ini jumlah buku profil potensi investasi sangat terbatas. Sebagai sarana pendukung kegiatan promosi diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas dalam penyusunan buku ini. Dalam upaya ini juga diperlukan kerja sama yang baik dengan instansi terkait serta pengalokasian dana yang cukup.

Promosi Potensi Daerah

Promosi potensi daerah merupakan kegiatan yang memerlukan sikap proaktif dari Pemerintah Daerah untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulan daerah yang bernilai jual tinggi kepada masyarakat kalangan dunia usaha, baik di daerah sendiri maupun luar daerah, bahkan luar negeri sehingga diharapkan dapat menumbuhkan niat para pemilik modal untuk menanamkan

modalnya. Selain mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah, dapat juga mempromosikan peluang investasi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan faktor pendukung investasi lainnya, seperti kemudahan prosedur perijinan, kepastian hukum, sistem perpajakan, dan jaminan keamanan yang dapat diberikan oleh daerah tersebut. Kegiatan promosi ini juga memerlukan kepekaan terhadap perkembangan dunia usaha dan kepekaan akan adanya minat para investor sehingga pemerintah dapat mempromosikan potensi tersebut pada pasar (tempat), konsumen (investor) serta pada waktu yang tepat.

Kegiatan promosi ini telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo melalui kegiatan pameran, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Dengan adanya pameran tersebut diharapkan banyak masyarakat luar daerah yang menjadi tahu akan potensi yang dimiliki oleh Kota Probolinggo. Hal tersebut merupakan cara yang baik untuk menumbuhkan minat para investor.

Dari kendala yang dihadapi, yaitu minimnya media promosi seperti buku profil potensi investasi dan brosur tentang potensi unggulan Kota Probolinggo dan minimnya dukungan dana, selain diperlukan adanya dukungan dari instansi lain terkait dalam pengadaan sarana tersebut serta adanya pengalokasian dana sesuai prioritas pameran, untuk dapat meningkatkan keberhasilan promosi juga diperlukan adanya hubungan langsung yang baik antara pemerintah sendiri dengan para pengusaha dan pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Denagn demikian akan banyak pengusaha atau pemilik modal yang secara langsung mengetahui potensi dan keadaan Kota Probolinggo.

c) Sebagai Entrepreneur

Peningkatan Kinerja Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

Kinerja dari pegawai atau suatu organisasi adalah hasil kerja yang dinilai dari produktivitas pegawai atau organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengingat akan peran penting dari Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam bidang penanaman modal dan tugas serta tanggung jawab yang cukup berat, maka diperlukan kinerja aparatur yang bagus sesuai dengan tugas masing-masing sehingga dapat mendukung pencapaian

visi, misi dan tujuan serta sasaran dari Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan konerja aparatur Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal tersebut. Adapun kegiatan yang telah diikuti oleh personil Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal meliputi Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Magang, *Workshop*, dan Lokakarya. Jadi pada intinya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mendukung upaya peningkatan investasi di daerah Kota Probolinggo.

Sampai saat ini kinerja Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo sudah cukup baik namun harus tetap terus ditingkatkan terutama dalam mencapai visi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal sendiri, yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan investasi di Kota Probolinggo.

Beberapa upaya lainnya masih merupakan suatu perencanaan, yaitu penyelenggaraan perijinan dengan sistem pelayanan satu atap dan pembentukan zona atau kawasan investasi di Kota Probolinggo. Kemudahan perijinan dan pelayanan yang cepat diberikan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam hal pembuatan Surat Persetujuan asalkan syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi, namun dalam hal pembuatan ijin teknis masih ditangani oleh instansi atau dinas yang terpisah. Selain itu belum ada penetapan biaya perijinan yang jelas dan pasti serta penetapan waktu penyelesaian pelayanan. Perijinan dengan pelayanan satu atap dimungkinkan dengan adanya suatu dinas atau instansi atau unit yang menangani semua perijinan yang berkaitan dengan penanaman modal, seperti Ijin Penanaman Modal, Ijin Usaha Tetap (IUT) atau Ijin Perluasan Usaha, Ijin mengerjakan tenaga kerja asing (IKTA), Ijin Lokasi, IMB, serta Ijin Undang-undang Gangguan/HO. Untuk memenuhi hal tersebut memerlukan suatu proses yang cukup panjang berkaitan dengan proses pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan kelembagaan pemerintah, prinsip yang perlu diperhatikan adalah ”Miskin Struktur Kaya Fungsi”. Selain itu, juga perlu memperhatikan *human capital* dan *structural capital* daerah dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang akan diberikan. Dengan adanya pembentukan lembaga atau dinas baru berarti akan ada penambahan atau pengurangan serta penggabungan satuan organisasi yang ada dengan juga harus mempertimbangkan penempatan semua personil yang ada ke dalam jajaran struktur organisasi dengan tetap memperhatikan profesionalisme kerjanya. Tujuan utama dari pembentukan kelembagaan tersebut adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan optimalisasi fungsi kelembagaan daerah, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan mengenai pembentukan kawasan investasi atau kawasan industri memerlukan perencanaan yang matang dengan memperhatikan pemilihan lokasi yang tepat dan strategis serta memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan nantinya. Selain itu juga perlu adanya penyediaan infrastruktur yang memadai oleh Pemerintah di kawasan industri tersebut.

Upaya lainnya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah dengan ditetapkannya kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penerangan jalan melalui Peraturan Daerah No 9 Tahun 2002, dari 5% menjadi 3%. Hal ini merupakan langkah yang berani diambil Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk menarik minat investor, walaupun dengan konsekuensi adanya penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak penerangan jalan, tetapi hal ini diharapkan akan dapat ditutupi dengan adanya keuntungan lain yang lebih besar yang akan diperoleh dari adanya investasi. Penurunan tarif pajak ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investor dalam perannya sebagai entrepreneur melalui pemberian insentif yang biasa dilakukan oleh negara atau daerah yang memerlukan masuknya investasi.

d) Sebagai Fasilitator

Penyelenggaraan Forum Investasi dan Temu Usaha

Forum ini merupakan wadah bagi para pihak yang berkaitan dengan bidang penanaman modal atau investasi untuk saling bertemu dan bekerjasama

serta membahas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi berkaitan dengan dunia usaha dan investasi, sehingga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara semua pihak dan saling menguntungkan. Selain itu, melalui forum ini Pemerintah dapat menampung masukan-masukan dari para pengusaha maupun LSM berkaitan dengan upaya perbaikan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hasil yang juga diharapkan dari adanya forum ini adalah meningkatnya jumlah pengusaha kecil yang menjalin pola kemitraan dan meningkatkan peluang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dari forum ini maka perlu ditingkatkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama secara intensif serta berkesinambungan dengan pihak BKPM, BPM Propinsi, Asosiasi Pengusaha Asing, Kedutaan Besar Negara Asing maupun dengan Pengusaha Industri Kecil (UKM) dan LSM.

3. Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Kota Probolinggo

a) Faktor Penghambat Investasi di Kota Probolinggo

Hingga saat ini perkembangan investasi di Kota Probolinggo kurang berjalan dengan lancar, padahal berbagai upaya telah dilakukan dengan sekuat tenaga dan juga telah didukung oleh potensi-potensi investasi yang cukup tinggi. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok bagi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, sekaligus permasalahan bagi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, karena yang diharapkan adalah tingkat investasi yang tinggi sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002:59), bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat investasi di daerah adalah ada tidaknya iklim yang kondusif dalam berinvestasi. Iklim yang kondusif tersebut dipengaruhi oleh adanya jaminan keamanan, kepastian hukum, terjaminnya *property right* dan *contrac right*, kemudahan prosedur administrasi (birokrasi), dan peraturan perpajakan daerah yang menarik bagi dunia usaha.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab kurangnya investasi tersebut yang sekaligus merupakan faktor penghambat investasi di Kota Probolinggo, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, secara umum dapat

dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern sebagai berikut :

1. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, yang meliputi :

a. Stabilitas keamanan dan politik nasional dan internasional, seperti instabilitas keamanan dan politik nasional pada masa reformasi, adanya tuntutan disintegrasi dari beberapa daerah di Indonesia, banyaknya konflik di daerah-daerah baik yang berupa konflik antar etnis maupun antar agama, dan terjadinya peledakan bom di banyak tempat seperti peledakan bom di Bali, Makasar, dan Hotel JW Marriott. Selain itu instabilitas keamanan internasional dengan semakin maraknya isu terorisme, kemudian disusul dengan terjadinya perang antara Irak dan Amerika yang juga berdampak terhadap keamanan internasional sehingga menyebabkan turunnya minat kerjasama antar negara terutama dalam bidang penanaman modal.

b. Kesan yang ada bahwa iklim investasi di Indonesia belum sepenuhnya terjamin karena masih banyak demo-demo buruh. Hal ini dapat menjadi fobia tersendiri bagi investor, terutama investor asing karena sering terjadi demo-demo buruh yang dilakukan dengan cara yang tidak rasional dan membabi buta. Hal ini juga mencerminkan budaya berpikir masyarakat Indonesia yang masih rendah.

c. Belum adanya pemberian fasilitas yang lebih bagi investor.

Sebagaimana disebutkan dalam Wijaya (2000:40), fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah bagi investor meliputi :

1. Fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas perpajakan atas pengimpor barang modal.
2. Fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang.
3. Fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk usaha industri tertentu.

Persetujuan pemberian fasilitas ini merupakan kebijakan dari BKPM atau BKPMD (Propinsi), dimana besarnya fasilitas yang diberikan tergantung dari kemampuan perekonomian suatu negara atau daerah yang bersangkutan. Pada kenyataannya masih banyak keluhan dari para investor yang merasa bea masuk atau bea cukai impor saat ini masih memberatkan bagi investor.

2. Faktor Intern

Yaitu faktor yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sendiri, antara lain meliputi :

Belum adanya keterkaitan antar instansi.

Kerjasama dan keterkaitan yang baik antara Pemerintah, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dengan instansi atau unit lainnya, juga antar instansi atau unit yang ada sangat diperlukan dalam memanajemen masalah penanaman modal, misalnya dalam penilaian suatu permohonan penanaman modal juga harus memperhatikan perencanaan tata ruang kota (Dinas Tata Ruang Kota) dan prinsip penggunaan lahan, dalam membuat surat persetujuan (MoU) bekerjasama dengan badan-badan hukum, dan dalam penyusunan potensi daerah serta penggalian potensi berkaitan dengan dinas-dinas yang bersangkutan.

Belum adanya keterkaitan antar instansi dalam menangani masalah penanaman modal ini dapat dilihat dari adanya kegagalan sejumlah rencana investasi di Kota Probolinggo yang lebih disebabkan karena tidak matangnya perencanaan, selain kurangnya kepastian hukum. Tidak matangnya perencanaan disebabkan karena dalam perencanaan tersebut Pemerintah kurang memperhatikan kerjasama dengan instansi terkait. Kegagalan rencana investasi tersebut dapat menghilangkan kepercayaan para investor dan calon investor lainnya terhadap Pemerintah sehingga dapat menghambat investasi di Kota Probolinggo.

Perlu diperhatikan pula bahwa selain faktor-faktor tersebut di atas masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan kurangnya investasi di Kota Probolinggo, yaitu instabilitas ekonomi, baik ekonomi nasional maupun internasional yang juga berpengaruh terhadap marak lesunya gairah investasi. Sejak terjadinya krisis ekonomi, Indonesia masih berada pada masa pemulihan ekonomi sehingga para investor masih menunggu waktu yang tepat untuk menanamkan modalnya, yaitu pada keadaan ekonomi yang diperkirakan

permintaan masyarakat akan hasil produksi pada posisi yang tinggi sehingga dapat memberikan imbalan jasa (laba) yang lebih menguntungkan dan resiko kegagalan investasinya lebih kecil.

Tingkat persaingan dengan daerah lain, terutama dengan daerah-daerah industri yang mampu menawarkan potensi dan keuntungan yang lebih besar bagi investor. Didukung pula oleh kecenderungan yang ada, bahwa para investor lebih berminat menanamkan modalnya pada bidang industri. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan investasi di Indonesia secara keseluruhan maupun di Jawa Timur sendiri, bahwa peringkat pertama diduduki oleh investasi di bidang industri.

b) Faktor Pendukung Investasi di Kota Probolinggo

Kemudahan sistem perpajakan merupakan salah satu faktor penarik bagi investor untk melakukan investasi di suatu daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2002:149), bahwa investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah, sehingga penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan, misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Sampai sekarang masih ada saja para investor yang melirik melakukan investasi atau menanamkan modalnya di Kota Probolinggo, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang menunjang peningkatan investasi di Kota Probolinggo, meliputi :

a. Letak Kota Probolinggo yang strategis

Letak geografis Kota Probolinggo cukup strategis yaitu merupakan Kota Transit yang menghubungkan kota-kota Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Jember yang berada disebelah timur dan kota-kota Pasuruan, Malang dan Surabaya yang berada disebelah Barat Kota Probolinggo. Dengan demikian Kota Probolinggo menjadi Kota Transit untuk lalu lintas perekonomian di Jawa Timur khususnya Kota Probolinggo dalam memasarkan hasil-hasil produksinya baik dipasar domestik maupun pasar global.

b. Potensi Investasi yang dimiliki Kota Probolinggo

Sebagaimana dikemukakan oleh Soedjito dalam Moeljaningsih (2003:45), bahwa ”Pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dan diamati dengan melalui

berbagai cara. Pengertian pertumbuhan secara implisit menyatakan perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam masyarakat baik yang menyangkut kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi". Dalam hal ini maka potensi-potensi investasi yang dimiliki Kota Probolinggo baik yang berupa sektor industri, perdagangan, perikanan, pelabuhan serta perkebunan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi melalui investasinya.

c. Jaminan keamanan yang dapat diberikan oleh daerah tersebut.

Jaminan keamanan yang diberikan daerah dapat mendukung pihak investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut karena rasa aman sangat penting bagi perkembangan investasi, dengan rasa aman maka investor dapat lebih tenang terhadap investasinya.

d. Sumber Daya Manusia yang sangat mendukung investasi

Penduduk usia produktif sebagai angkatan kerja dan karakteristik masyarakat yang baik merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi daya tarik pihak investor. Selain itu, kerjasama antara masyarakat dan pihak Pemerintah Daerah dalam memajukan investasi daerah juga berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya ikut andil masyarakat yang memiliki UKM dalam Musyawarah nasional (munas) III Asosiasi Pemkot seluruh Indonesia (Apeksi) dalam Indonesia City Expo (ICE) dan mozaik seni nusantara di The Sunan Hotel, Solo pada 23-27 Juli 2008 dalam rangka mempromosikan potensi daerah Kota Probolinggo.

e. Sistem perpajakan yang pasti

Adanya sistem perpajakan yang telah dibuat, disusun dan diatur secara pasti dan tepat membuat para investor dapat mengatur dengan rinci semua hal yang berhubungan dengan usahanya, sehingga investor dapat mereka-reka tentang perkembangan dan prospek yang akan mereka peroleh dalam melaksanakan investasi tersebut.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian mengenai peran pemerintah dalam menunjang peningkatan investasi daerah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kota Probolinggo merupakan suatu daerah yang mempunyai potensi yang tinggi terutama potensi alamnya yang dapat dikembangkan melalui sektor-sektor unggulan yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan banyak yang belum tergali dan termanfaatkan secara optimal, yaitu meliputi potensi industri, perdagangan, perikanan, pelabuhan, dan perkebunan. Potensi daerah ini memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modal di Kota Probolinggo.
2. Dalam perannya sebagai entrepreneur, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo secara optimal yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal yang terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitasnya, juga melalui penetapan kebijakan-kebijakan pemberian insentif, serta upaya penyediaan infrastruktur yang lebih mendukung investasi di Kota Probolinggo.
3. Dalam peningkatan investasi di Kota Probolinggo terdapat faktor yang menjadi kendala atau penghambatnya, yaitu meliputi faktor dari luar Pemerintah Kota Probolinggo dan dari dalam Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sedangkan faktor penghambat yang terdapat di Kota Probolinggo sendiri adalah stabilitas keamanan dan politik nasional dan internasional yang masih belum sepenuhnya mendukung, serta belum adanya keterkaitan antar instansi.

   Sedangkan dalam menarik investor di Kota Probolinggo juga terdapat beberapa yang menjadi pendukungnya, yaitu Letak Kota Probolinggo yang strategis, jaminan keamanan yang dapat diberikan oleh daerah tersebut, dan potensi investasi yang dimiliki Kota Probolinggo. Juga dapat disimpulkan bahwa Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kota Probolinggo telah

menunjukkan kinerjanya yang sangat baik dalam peran menunjang peningkatan investasi di Kota Probolinggo.

B. Saran

Berdasarkan fenomena-fenomena yang berhasil ditangkap oleh penulis, berkaitan dengan masalah peningkatan investasi di Kota Probolingggo, mencoba menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam bidang penggalian dan pengembangan potensi daerah serta terus mengadakan inventarisasi kembali berbagai potensi daerah yang diprioritaskan atau diunggulkan.

   Penyelenggaraan promosi potensi daerah secara lebih agresif serta menjalin hubungan yang baik dengan kalangan pengusaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
3. Segera dibentuknya kawasan investasi melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan penentuan lokasi yang tepat dan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang kota, dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan nantinya, serta penyediaan infrastruktur yang memadai bagi kawasan investasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Bintoro Tjokroamidjojo. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Erlangga.

H. Siagian. 1982. *Pembangunan Ekonomi dalam Cita-Cita dan Realita.* Bandung: Alumni

Jhingan, M. L. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jimung, Martin, Msi. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesi*a. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kansil, C. S. T, dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Keynes, J. M. 1991. *Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga dan Uang.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Koentjaraningrat. 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia.

Lincolin Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta: STIE YKPN

Malayu S.P. Hasibuan. 1987. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*. Bandung:Armico.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajjemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mudrajad Kuncoro, 1997.:*Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media

Musgrave, R. A., Peggy B. Musgrave. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Erlangga.

Nugroho Iwan, Dahuri Rochmin, 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES

Panjaitan, H., dkk. 1996. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan atau Penyempurnaan Undang-undang Penanaman Modal*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Siagian, Sondang P. 1990. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya.* Jakarta: PT Bumi Aksara..

Sukirno, S. 1995. *Pengantar Teori Makroekonomi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumantoro. 1988. *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia.*

Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua.*

Todaro. M. P., 1994. *Ekonomi untuk Negara Berkembang.* Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, A.W. 2000. *Administrasi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wiroatmodjo, Piran, I Made Suwandi, dan Darma Setyawan. 2001. *Pembangunan Saerah, Sektor dan Nasional*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Penda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Undang-undang dan Peraturan-peraturan:

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Profil wilayah Kota Probolinggo tahun 2006/2007, diakses pada tanggal 3 Maret 2009 dari http://www.pemkot-probolinggo.com

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145
Telp. (0341) 553737, 568914, 556703 dan 551611 pes. 205 Fax. (0341) 553737
E-mail:fia@brawijaya.ac.id
Program Studi: •S1 Adm. Publik •S1 Adm. Bisnis •DIII Kesekretariatan •DIII Pariwisata •Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan •S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 706 / J.10/1.14/PG/2009
Lampiran : **1 eksemplar**
Hal : **Riset**

Kepada : **Yth. Bapak Walikota Probolinggo**
Pemerintah Kota Probolinggo
Di Tempat

SURAT PENGANTAR RISET

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : **DENY OCTAVIA**
Alamat : **Jl. Minak Jinggo No. 1 RT 01 RW 07 Probolinggo**
N I M : **0510313028**
Jurusan : **Administrasi Publik**
Konsentrasi : **Administrasi Pembangunan**
Tema : **Peran dan Upaya Pemerintah dalam Menunjang Peningkatan Investasi Daerah (Studi pada Bagian Perekonomian Kota Probolinggo)**
Lamanya : **2 Februari 2009 - 28 Februari 2009**
Peserta : **1 (Satu) orang**

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 28 Januari 2009
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA.PhD
NIP. 130 704 332

Tembusan:
1. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Kota Probolinggo
2. Yth. Kepala Bakesbang dan Linmas Kota Probolinggo
3. Arsip

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Dr. Moch. Saleh No. 5 Telepon (0335) 426436
PROBOLINGGO 67211

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH/PKL

Nomor : 072/ 06 7/425.206/2009

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tanggal 28 Januari 2009 Nomor : 706/J.10/1.14/PG/2009 perihal riset.

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1972.
2. Surat Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Gub./187/1972 tanggal 17 Juli 1972.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan penelitian oleh :

N a m a / NIM	:	**DENY OCTAVIA / 0510313028**
A l a m a t	:	Jl. Minak Jinggo 1, RT/RW.01/07 Kelurahan Jati Kec. Mayangan
Thema / Judul Penelitian	:	**Peran Pemerintah dalam menunjang peningkatan Investasi Daerah** (Studi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Probolinggo).
Daerah / tempat Penelitian	:	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
Lamanya Survey / Research	:	mulai tanggal 05 Pebruari s/d 28 Pebruari 2009.
Pengikut / Peserta Survey / Research	:	--

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Resort setempat;
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum Pemerintah setempat;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan diluar sebagaimana dimaksud dalam tujuan ijin;
5. Setelah berakhirnya survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey / research;
6. **Dalam jangka waktu satu bulan setelah dilakukannya survey / research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Walikota Probolinggo Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat;**
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.

Probolinggo, 05 Pebruari 2009

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA PROBOLINGGO.
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. ACHMAD, M.Si
Pembina
NIP. 510 051 714

TEMBUSAN Yth.:
1. Bapak Walikota Probolinggo (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan KESBANG Prop. JATIM

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Panglima Sudirman No. 19 Telp. (0335) 421228
PROBOLINGGO - 67211

Probolinggo, // Pebruari 2009

Nomor. : 500/27/425.031/2009
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Pengantar Riset a.n. DENY OKTAVIA

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya Malang
di
MALANG

Menunjuk surat Saudara tanggal 28 Januari 2009 Nomor : 706/J.10/1.14/PG/2009 perihal Surat Pengantar Riset a.n. DENY OKTAVIA, dengan ini diberitahukan bahwa Sdr. DENY OKTAVIA telah melaksanakan riset di kantor kami Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Berhubung telah berakhirnya Riset / survey maka dari kami selanjutnya menyerahkan pada pihak Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw Malang.

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
U.b
Kepala Bagian Perekonomian
Dan Penanaman Modal

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
Sekretariat Daerah

Dra. HERRIEN PURNAMAWATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 010 164 699

INTERVIEW GUIDE

1. Untuk dapat menarik investor dalam menanamkan modalnya, suatu daerah harus dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Apakah di Kota Probolinggo sudah tercipta iklim berusaha yang kondusif ?
2. Melihat perkembangan investasi di Kota Probolinggo saat ini, tingkat investasi di Kota Probolinggo dapat dikatakan tinggi, sedang atau massih rendah ? Dan apa yang menjadi factor penghambat dan pendukung investasi di Kota Probolinggo?
3. Selama ini permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di Kota Probolinggo berkaitan dengan investasi/ penanaman modal?
4. Sesuai dengan perannya, apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menunjang peningkatan investasi daerah?
5. Bagaimana prospek investasi di Kota Probolinggo, berdasarkan:
   a. Potensi-potensi investasi yang ada.
   b. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan investasi/penanaman modal.
   c. Faktor penghambat dan pendukung jalannya investasi.
   d. Dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Deny Octavia

Nomor Induk Mahasiswa : 0510313028

Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo, 25 october 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan :
1. SD Negeri Sukabumi 2 Probolinggo Tamat tahun 1999
2. SMP Negeri 2 Probolinggo Tamat tahun 2002
3. SMA Negeri 4 Probolinggo Tamat tahun 2005

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri 4 Probolinggo Tahun 2003-2004
2. Anggota Ekstrakurikuler Jurnalistik di SMA Negeri 4 Probolinggo Tahun 2003-2004
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Sebagai Staff Bagian Humas Masa Jabatan 2006/2007

Pengalaman Kepanitiaan :

1. Panitia Ospek Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Sebagai Mentor Tahun 2006

Pengalaman Kerja :

Magang di Bagian Fungdik dan ICT Dinas Pendidikan Kota Malang selama 1 bulan.